



Review

Edisi III Tahun 2016

Media Informasi LPMP Provinsi Kalimantan Barat

Liputan Utama

Pemetaan Mutu Pendidikan Dan Program Pengembangan Sekolah Model Tahun 2016

LPMP Inside

Pengembangan Sekolah Model Dan Pola Pengimbasan

Bhakti Sosial Dharma Wanita Persatuan LPMP Kalimantan Barat

Artikel Pendidikan

Kinerja Guru Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Di Wilayah UPTD Karangan Dikbud Kecamatan Mempawah Hulu

Pendidikan Literasi Sekolah Di Daerah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia

Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Supervisi
Pembelajaran Di Kelas Dalam Perspektif Profesi Pendidikan

Profil

Tiga Widyaiswara LPMP Kalimantan Barat
Sukses Melakukan Orasi Ilmiah Menuju Jabatan Fungsional
Widyaiswara Utama

ISSN 1829-9547



Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pembina

Dr. Suhartono Arham, M.Si

Penasehat

Dra. Dwi Karyani, M. Pd
Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si
Kurniadi, SE, MM

Pimpinan Umum

Drs. Abdi Tauhid, MM

Pimpinan Redaksi

Mujahir, M.Pd

Tim Redaksi

M. Dery Desturi, S.Kom, M.Cs
Sri Rahayu, SE
Helda Rosida, S.Sos
Oktariana Dwi Wulandari, M.Pd
Edi Rasni, S.Si
Lukman, S.Pd

Lay Out & Photographer

Irfan Marindra, SP, S.Kom

Keuangan

Hendrik Jokolestono

Humas dan Distribusi

Mardianto

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT kini Buletin **LPMP Review Tahun 2016** sebagai salah satu media informasi LPMP Provinsi Kalimantan Barat kembali hadir dan tampil setelah terhenti di tahun sebelumnya.

LPMP Review edisi ketiga Tahun 2016 ini akan mengulas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di LPMP Provinsi Kalbar dan diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi dibidang kependidikan khususnya di Kalimantan Barat.

Liputan Utama LPMP Review mengulas tentang Pemetaan Mutu Pendidikan Dan Program Pengembangan Sekolah Model Tahun 2016 yang merupakan program lanjutan dari pelaksanaan Pelatihan Kurikulum 2013.

Di rubrik **LPMP Inside**, terdapat informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Barat diantaranya seperti Pengembangan Sekolah Model Dan Pola Pengimbasan, Bhakti Sosial Dharma Wanita Persatuan LPMP Kalimantan Barat, dan Sosialisasi Percepatan Penyampaian Kartu Indonesia Pintar Di Kalimantan Barat.

Rubrik **Profil** sedikit mengulas tentang Tiga Widyaiswara LPMP Kalimantan Barat yang Sukses Melakukan Orasi Ilmiah Menuju Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama dengan pangkat golongan IV/d, siapa-siapa saja mereka dapat anda simak pada rubrik ini.

Artikel Pendidikan akan memberikan anda banyak informasi seputar dunia pendidikan. Beberapa tulisan diantaranya mengulas tentang Kinerja Guru Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Wilayah UPTD Karang Dikbud Kecamatan Mempawah Hulu, Pendidikan Literasi Sekolah Di Daerah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia, Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Supervisi Pembelajaran Di Kelas Dalam Perspektif Profesi Pendidikan, dan beberapa tulisan lainnya yang dapat memberikan manfaat.

Akhir kata, selamat membaca dan semoga apa yang kami sajikan ini memberikan manfaat bagi kita semua.. Amin.

Tim Redaksi
LPMP Review

Redaksi **LPMP Review** mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, gambar dan foto yang relevan. Karakteristik isi tulisan antara lain : menarik, relevan dengan pembelajaran di kelas, informatif, inovatif, dan dapat digunakan. Tulisan berkisar 3-5 halaman dengan spasi tunggal atau 5-10 halaman dengan spasi ganda berupa soft copy dalam CD.
Contact Person : **Sri Rahayu** (0852 5240 1340), **Irfan Marindra** (0813 4524 5997)

Alamat Kantor Redaksi

Jl. Abdul Muis Tanjung Hulu, Pontianak
Kalimantan Barat
Telp. (0561) 742110, Fax. (0561) 746618
E-Mail : fansmaniac@gmail.com

Sambutan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara tercinta.

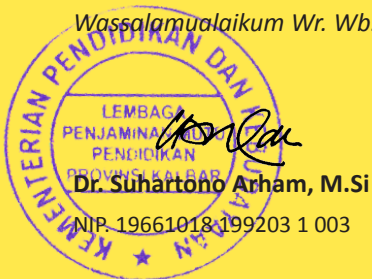
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berusaha melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang dapat memberikan jaminan mutu pendidikan terutama dalam usaha peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya media informasi dan komunikasi kelembagaan untuk menyampaikan program - program kerjanya kepada masyarakat.

Buletin LPMP Review pada tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu media penyampaian informasi agar dapat mereview kinerja dari LPMP kepada masyarakat umum terutama di bidang pendidikan.

Akhirnya, semoga buletin ini dapat bermanfaat bagi semua para pembaca dan kami juga mengharapkan partisipasi dari semua pihak terutama pemerhati pendidikan untuk dapat ikut memberikan tulisannya sehingga buletin ini dapat semakin lengkap dan lebih baik.

Saya ucapkan selamat membaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Dr. Suhartono Arham, M.Si

NIP. 19661018 199203 1 003

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL TAHUN 2016



Penjaminan mutu pendidikan adalah satu kegiatan yang berusaha menjamin pelaksanaan proses di satuan pendidikan. Dengan penjaminan mutu pendidikan di harapkan semua yang berlangsung di sekolah berjalan sesuai dengan kriteria-kriteria atau tata aturan yang telah ditetapkan.

Dikdasmen pada tahun ini telah menggariskan program-program untuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, di antaranya dengan program pemetaan mutu pendidikan dan program sekolah model.

Pemetaan mutu pendidikan adalah satu proses pengambilan data dan penyusunan profil mutu sekolah, satuan pendidikan yang terpetakan. Prosesnya akan berlangsung dengan aplikasi yang kemudian akan di install ke laptop atau komputer sekolah. Pelaksanaan pengumpulan data akan di supervise oleh pengawas sekolah dan diharapkan seluruh sekolah di Indonesia dapat terpetakan mutu pendidikannya di tahun 2016. Sistem ini kedepannya akan menempel di dapodik, sehingga di harapkan sekolah pada akhirnya juga dapat mengetahui kondisi sekolahnya berdasarkan instrument yang dijalankan dan hasil penyusunan peta mutu dapat pula di ketahui oleh sekolah.

Adapun terlebih dahulu harus di ketahui menyangkut pemetaan mutu yang di laksanakan yaitu melalui langkah-langkah:

- Sistem penjaminan mutu pendidikan
- Prosedur pengumpulan data mutu pendidikan
- Pemahaman instrument pengumpulan data mutu pendidikan
- Pemahaman terhadap aplikasi pengumpulan data mutu pendidikan
- Monitoring dan Evaluasi (untuk kepentingan Verifikasi dan Validasi)

Setelah proses pengumpulan data mutu akan di lanjutkan dengan proses pengembangan peta mutu pendidikan dengan tahapan:

- Pelatihan penyusunan peta mutu
- Persiapan pengolahan data, analisis kebutuhan, pengumpulan data penunjang
- Pengolahan dan analisis data serta penyusunan peta mutu wilayah
- Penyusunan rencana peningkatan mutu
- Diseminasi peta mutu pendidikan dan rencana peningkatan mutu pendidikan wilayah

Program sekolah model adalah program pengembangan penjaminan mutu pendidikan di sekolah yang menjadi sasaran di mana di harapkan di sekolah model tersebut telah terbentuk system untuk terlaksananya semua proses di sekolah baik manajemen atau pembelajaran.

Tahapan untuk kegiatan di kegiatan pengembangan sekolah model ini adalah :

- Pelatihan fasilitator untuk pengembangan sekolah model
- Penetapan sekolah sasaran bersama pemerintah daerah
- Pelatihan SPMI untuk sekolah model
- Pendampingan fasilitator
- Monitoring dan Evaluasi
- Diseminasi hasil pengembangan sekolah model

TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH

1. Pelatihan TUJUAN :

Tujuan pelatihan adalah memberikan keterampilan kepada calon fasilitator daerah dalam melaksanakan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerahnya

INDIKATOR KEBERHASILAN :

Kompetensi 1

- Peserta dapat memahami isi instrumen dan mekanisme pengumpulan data mutu mulai dari persiapan, pelatihan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
- Peserta dapat melakukan analisis terhadap data mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
- Peserta dapat melakukan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan (termasuk peningkatan mutu) kepada sekolah.
- Peserta dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerah.

Kompetensi 2

Peserta memiliki kemampuan dalam melakukan fasilitasi kepada pengawas sekolah/kepala sekolah/guru dalam menerapkan SPMI. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan di Daerah, ini dibentuk oleh dinas pendidikan.

TUGAS :

- Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI;
- Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI pada satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di daerah; dan
- Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah kepada pemerintah daerah.

2. Bimtek Penjaminan Mutu

Dalam Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Ini di Lakukan Bimtek Penjaminan Mutu.

TUJUAN :

Memberikan keterampilan kepada peserta dalam melaksanakan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan.

INDIKATOR KEBERHASILAN :

Kompetensi 1

- Peserta dapat memahami dan menjelaskan isi instrumen dan mekanisme pengumpulan data mutu mulai dari persiapan, pelatihan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
- Peserta dapat melakukan analisis terhadap data mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
- Peserta dapat melakukan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan (termasuk peningkatan mutu) kepada sekolah.
- Peserta dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerah.

Kompetensi 2

- Peserta memiliki kemampuan dalam melakukan fasilitasi kepada sekolah dalam menerapkan SPMI.

Rangkaian kegiatan penjaminan mutu pendidikan di tahun 2016 di harapkan dapat berlangsung dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang di gariskan sehingga dapat tercapai *output* yang di inginkan.

LPMP Kalimantan Barat dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi baik dari segi pelatihan, pengawasan dan evaluasi. Peran aktif seluruh instansi dan stake holder terkait sangat diperlukan demi mensukseskan kegiatan ini.

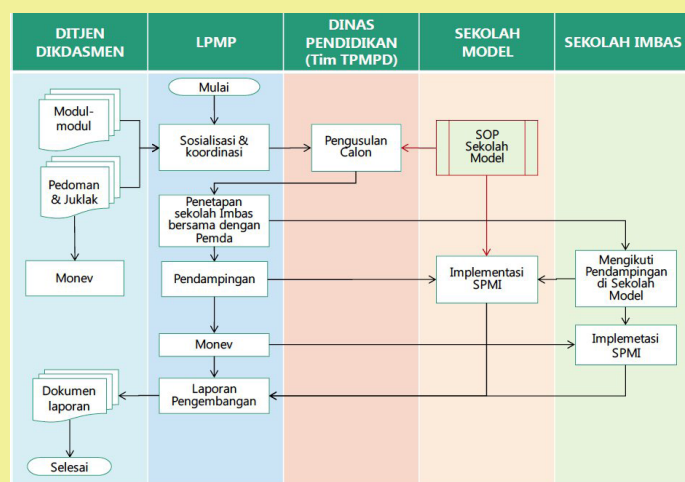
(Irfan)

PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL DAN POLA PENGIMBASAN

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.

Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi SNP untuk dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk memenuhi SNP. Pembinaan oleh LPMP dilakukan hingga sekolah telah mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dijadikan sebagai sekolah percontohan bagi sekolah lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya, sekolah yang diimbaskan ini selanjutnya disebut dengan sekolah imbas.

Prosedur pengembangan sekolah model dan pengimbasan ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Tujuan kegiatan sosialisasi dan koordinasi adalah untuk menginformasikan kepada pemerintah daerah terkait penerapan penjaminan mutu pendidikan dengan mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya. Pedoman, petunjuk pelaksanaan dan modul yang telah disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan pusat disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi dilakukan oleh LPMP. LPMP dapat mengikuti strategi berikut dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh LPMP dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah (dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota) untuk mensosialisasikan tentang penerapan penjaminan mutu pendidikan dengan mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya.

Materi kegiatan sosialisasi dan koordinasi meliputi:

- Pemahaman umum sistem penjaminan mutu pendidikan.
- Peran pemerintah daerah dalam penjaminan mutu
- Pemahaman dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah (SPMI)
- Pengembangan sekolah model dan pola pengimbasannya

2. Sosialisasi yang dilakukan melalui media informasi dan teknologi seperti pengunggahan informasi dalam bentuk poster infografis pengembangan sekolah model dan pola pengimbasannya pada website. Poster ini juga dapat dicetak dan diberikan kepada

pemerintah daerah untuk diperbanyak dan disebarikan kepada sekolah.

3. Melakukan pendekatan personal dengan pejabat tertinggi pemerintah daerah secara intens seperti gubernur, bupati, walikota, ketua DPRD dan lainnya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

Pengusulan daftar sekolah model beserta sekolah imbasnya ditindaklanjuti oleh LPMP dengan dibantu oleh tim dari pemerintah daerah. Proses tindak lanjut oleh LPMP berupa verifikasi dan validasi. Proses ini dapat dilakukan dengan kunjungan sekolah, pencocokan dokumen sekolah dengan data pokok pendidikan, survey petugas LPMP ke sekolah untuk mengukur kondisi awal sekolah, *Focus Group Discussion* dengan seluruh komponen dari calon sekolah untuk mengetahui komitmen dan kesungguhan mereka.

Pemerintah daerah dapat mengusulkan sekolah model di luar kuota yang diberikan oleh LPMP dengan kesepakatan bahwa sekolah di luar kuota akan didukung dan dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri dan dibina oleh fasilitator daerah. LPMP memfasilitasi dengan melatih fasilitator daerah yang diusulkan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan sekolah model secara mandiri.

Pelatihan SPMI untuk Sekolah Model

Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP dengan melibatkan fasilitator daerah atau tim penjaminan mutu pendidikan dengan pola *"whole school approach"*. Pelatihan SPMI dirancang sefleksibel mungkin baik dari sisi materi maupun metode pelatihan sehingga dapat diikuti oleh semua peserta dari berbagai level. Oleh karena itu, ruang lingkup pelatihan tidak hanya tersampainya substansi yang harus diterima oleh peserta pelatihan namun juga termasuk keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penerapan penjaminan mutu internal di sekolah.

Materi pelatihan SPMI diambil dari pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Implementasi Sekolah Model

Sistem penjaminan mutu internal di sekolah harus dilakukan oleh seluruh anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sesuai tugasnya masing-masing, siswa dan lainnya. Ada lima tahapan siklus yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Tahap pertama adalah memetakan mutu sekolah melalui kegiatan evaluasi diri sekolah.
2. Tahap kedua adalah membuat perencanaan peningkatan mutu sekolah termasuk manajemen, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sumberdaya manusia dan dukungan infrastruktur.
3. Tahap ketiga pelaksanaan program penjaminan mutu sekolah.
4. Tahap keempat Monitoring dan Evaluasi
5. Tahap kelima adalah penetapan standar baru dan penyusunan strategi baru.

Pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya dirancang untuk mewujudkan terciptanya layanan pendidikan yang bermutu di seluruh sekolah di Indonesia pada tahun 2019.

BHAKTI SOSIAL DHARMA WANITA PERSATUAN LPMP KALIMANTAN BARAT



Di pertengahan tahun 2016 ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) LPMP Kalimantan Barat tetap eksis mengadakan kegiatan, salah satu diantaranya yakni kegiatan eksternal berupa bhakti sosial.

Kegiatan bhakti sosial ini ditujukan untuk saling berbagi kasih kepada sesama dan menunjukkan niat yang baik bagi setiap anggota DWP LPMP Kalimantan Barat dan menumbuhkan jiwa sosialnya.

Sebuah panti asuhan kecil yang terletak di Desa Sungai Rengas ini bernama “Panti Asuhan Baitul Hikmah” yang beralamat di Jalan Tangel Laut RT 02 /RW 07 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Panti Asuhan Baitul Hikmah saat ini memiliki 3 unit bangunan utama semi permanen 1 unit untuk asrama Putra seluas 13x10 m2, 1 unit asrama Putri, yang terdiri dari : 1 ruang pengasuh, 1 ruang aula, 1 ruang belajar, 1 musolla dan, 2 ruang putri. seluas 12x24 m2. 1 unit untuk dapur umum terdiri dari: 1 ruang masak 1 ruang gudang 1 ruang makan.

Anak-anak yatim piatu yang diasuh kurang lebih

berjumlah 37 orang dan hampir semuanya masih duduk di bangku sekolah dasar. Beberapa diantaranya masuk panti asuhan ini dikarenakan kondisi yatim piatu, miskin/tidak mampu, melanjutkan pendidikan tetapi tidak memiliki rumah, putus pengadilan, dan korban kekerasan. Jumlah penghuni panti Asuhan Baitul Hikmah ini terdiri dari 22 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

“Meskipun mungkin yang kita bantu tidak banyak, namun ini menjadi salah satu bentuk niat baik kita dalam menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama terutama anak-anak yatim piatu dan terlantar ini” demikian ungkap Ny. Dra. Rahma Suhartono Arham ketua DWP LPMP Kalimantan Barat.

Bantuan yang diberikan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang sekiranya dapat bermanfaat bagi anak-anak asuhan ini. Semoga kedepannya kegiatan Dharma Wanita tidak hanya kegiatan internal saja melainkan kegiatan eksternal lainnya yang lebih baik lagi.

SOSIALISASI PERCEPATAN PENYAMPAIAN KARTU INDONESIA PINTAR DI KALIMANTAN BARAT



Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.

Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juta anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).

KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.

KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. Selain itu KIP juga menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

- Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
- Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
- Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar daerah.
- Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Prioritas Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

- Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016.

- Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemdikbud dan Kemenag.
- Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial
- Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan Pondok Pesantren (sejenis FUM/Formulir Usulan Madrasah).
- Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam.

LPMP Kalimantan Barat yang merupakan UPT di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditunjuk untuk melakukan sosialisasi percepatan penyampaian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kalimantan Barat. Tercatat masih banyak siswa/anak usia sekolah yang belum menerima KIP di Kalimantan Barat, beberapa penyebabnya diantaranya seperti :

- Kurangnya sosialisasi dari pihak penyalur KIP pada Kabupaten/Kecamatan yang menerima
- Data penerima merupakan data yang kurang *up to date* sehingga ada penerima yang sudah memasuki masa pasca usia sekolah, menikah, meninggal dunia, dan sudah masuk kategori mampu.
- Masih ada beberapa data dengan nama yang ganda.



TIGA WIDYAISWARA LPMP KALIMANTAN BARAT SUKSES MELAKUKAN ORASI ILMIAH MENUJU JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA UTAMA



Pada tahun 2016 ini LPMP Kalimantan Barat sukses mengadakan Orasi Ilmiah bagi tiga Widyaiswara nya, yakni **Kasim, S.Pd, M.Si, Mujahir, M.Pd, dan Kusmoro, M.Pd.** Ketiga widyaiswara ini dibimbing langsung oleh dosen-dosen Universitas Tanjungpura yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Kalimantan Barat diantaranya yakni Bapak Prof. Marzuki dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Orasi ilmiah ini ditujukan untuk memenuhi syarat menduduki jabatan Widyaiswara Utama dengan pangkat golongan IV/d di LPMP Kalimantan Barat. Proses penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : (1) *Tahap pertama* melakukan penelitian pendahuluan, untuk mendapatkan data awal yang diperlukan yaitu yang berkenaan dengan penetapan lokasi penelitian, menelusuri berbagai referensi yang relevan, serta data-data berdasarkan fokus penelitian, (2) *Tahap* yaitu pencarian data dan informasi yang diperlukan dengan penyebaran instrument, observasi, wawancara, dan analisis dokumen pendukung, dan (3) *Tahap ketiga* adalah tahap pengolahan dan analisis data serta penyelesaian proses penulisan. Selanjutnya laporan penelitian tersebut dijadikan naskah karya tulis ilmiah yang telah diselesaikan dan diseminarkan atau Pra Orasi Ilmiah.

Pra orasi ilmiah dan orasi ilmiah dihadiri oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pejabat di lingkungan LPMP Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Mahasiswa, dan Staf LPMP Kalimantan Barat.

Karya tulis ilmiah ini disusun di samping untuk kepentingan pemenuhan kewajiban Orasi Ilmiah bagi setiap widyaiswara guna mencapai jabatan Widyaiswara Utama sebagai program pengembangan kompetensi widyaiswara, juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada LPMP Kalimantan Barat dalam : (1) melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan (2) menyelenggarakan fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan (perbaikan dan atau pembinaan guru) dari kompetensi guru yang masih dibawah ketentuan berdasarkan kenyataan empirik yang dapat diketemukan dari hasil penelitian.

Masing-masing widyaiswara mengambil topik dan permasalahan yang berbeda-beda dalam setiap penelitiannya. Pada intinya topik dan permasalahan ini erat kaitannya dalam peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Barat.

"Ini adalah langkah awal yang baik bagi kita, karena tidak banyak widyaiswara yang terus berupaya meningkatkan kompetensinya hingga profesi yang lebih tinggi. Ini patut kita dukung dan kita berikan apresiasi !" tegas Dr. Suhartono Arham, M.Si Kepala LPMP Kalimantan Barat pada kata sambutannya dalam orasi ilmiah.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyampaikan pula bahwa orasi ilmiah ini penting dilakukan terutama bagi setiap Widyaiswara dimanapun ia bertugas. Karena manfaat yang dapat diambil adalah dari hasil penelitian ini selain sebagai pengembangan kompetensi juga sebagai bahan acuan bagi pengembangan lainnya seperti peningkatan mutu pendidikan.

Diharapkan jejak langkah ketiga widyaiswara LPMP Kalimantan Barat ini menjadi motivasi bagi keseluruhan widyaiswara lainnya untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. "Jangan jadikan usia dan wawasan menjadi penghambat dalam meningkatkan profesi, kita juga harus yakini bahwa peningkatan keprofesian ini juga merupakan tonggak utama dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu dan kualitas suatu lembaga atau instansi dimana kita mengabdikan." Ungkap pak Anton sebelum mengakhiri sambutannya dalam orasi ilmiah yang dilakukan sebanyak dua kali dalam tahun 2016 ini.

KINERJA GURU SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI WILAYAH UPTD KARANGAN DIKBUD KECAMATAN MEMPAWAH HULU

Oleh : Mujahir,M.Pd. *)

ABSTRAK

Mujahir. NIP 196008231984031006, Kinerja Guru Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Wilayah Unit Pelayanan Teknis Daerah Karangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mempawah Hulu. Sebuah Penelitian Kualitatif Deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Kinerja guru sekolah dasar, (2) Upaya-upaya apa yang harus ditempuh dalam meningkatkan kinerja guru sekolah dasar, (3) Strategi peningkatan kinerja guru sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti memilih metode dan teknik penelitian karena masalah yang dikaji menyangkut masalah yang sedang berkembang dalam kehidupan, khususnya UPTD Karangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, diharapkan deskripsi atas fenomena yang tampak di lapangan dapat diinterpretasi makna dan isinya secara mendalam. Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu rumpun penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan salah satu ilmu tentang fenomena atau yang nampak, untuk menggali esensi makna yang terkandung di dalamnya. Instrumen penelitian menggunakan angket dan disempurnakan dengan triangulasi melalui pedoman wawancara.

Hasil analisis dari 48 orang guru yang sudah bersertifikasi terdapat 15 orang guru berkinerja sangat baik dengan prosentase 31,25%, 33 orang bernilai baik dengan prosentase 68,75%, tak seorang guru pun bernilai sedang, cukup dan kurang. Penilaian kinerja guru (PK-Guru) tidak ada yang bernilai sedang, cukup atau kurang, memang kenyataannya selama ini tak terdapat guru yang penilaian kinerja guru dengan sebutan sedang, cukup, dan kurang, tetapi kenyataannya selalu bernilai baik. Ada 48 orang guru yang belum bersertifikasi terdapat 13 orang guru berkinerja sangat baik dengan prosentase 27,08%, dan 35 orang guru bernilai baik dengan prosentase 72,92%, tak seorang pun bernilai sedang, cukup dan kurang. Penilaian kinerja guru (PK-Guru) tidak ada yang sedang, cukup atau kurang, memang kenyataannya selama ini tak terdapat guru yang penilaian kinerja guru dengan sebutan sedang, cukup, dan kurang, tetapi bernilai baik. Kalau demikian penilaian kinerja guru baik atau amat baik maka gurutersebut dapat naik pangkat berdasarkan kinerja dan prestasi kerjanya baik. Maka pembinaan guru yang dilakukan terus menerus oleh UPTD Karangan Dikbud Mempawah Hulu dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Kata Kunci : Kinerja guru, sekolah dasar, meningkatkan mutu, mutu pendidikan



A. PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat kehidupan bangsa yang semakin maju dan sejahtera. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 7 menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, guru sebagai pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pentingnya peranan guru berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia guru itu sendiri sebagai *output*. Namun dalam peningkatan mutu terdapat kendala yang sifatnya positif atau negatif.

Di antara kendala paling mendasar seringkali dialami oleh guru, baik secara internal maupun eksternal adalah: (1) kondisi internal, upaya pemenuhan kebutuhan hidup, kesempatan untuk pengembangan karir, dan peningkatan kesejahteraan guru di Wilayah UPTD Karangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak merupakan suatu hal yang menyulitkan; (2) kondisi eksternal, bagi guru yang berdomisili atau bertugas di daerah pedalaman atau daerah-daerah terpencil, maka kebutuhan akan akses berupa informasi, komunikasi, transportasi, dan jalan bisa menjadi kendala atau masalah yang berarti dalam melaksanakan tugas.

Melalui penelitian ini diharapkan guru-guru dapat meningkatkan kinerjanya, dan meningkatkan motivasinya untuk melaksanakan tugas sebagai pengajar dan pendidik yang bisa digugu dan ditiru. Pelaksanaan tugas sebagai guru dirasa berat namun di tangan guru-guru sekolah dasar inilah mutu murid di pertaruhkan. Bukan hanya sekedar

membaca dan menulis sekaligus pembentukan karakter sumber daya manusia Indonesia dimulai pada fase sekolah dasar.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan pelaksanaannya di UPTD Karangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak pada tahun 2016. Perlakuan penelitian ini dilaksanakan pada guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah di wilayah UPTD Karangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016.

Teknik pengambilan subyek penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu sample yang bertujuan mampu memberikan formasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Adapun desain penelitian sebagai berikut :

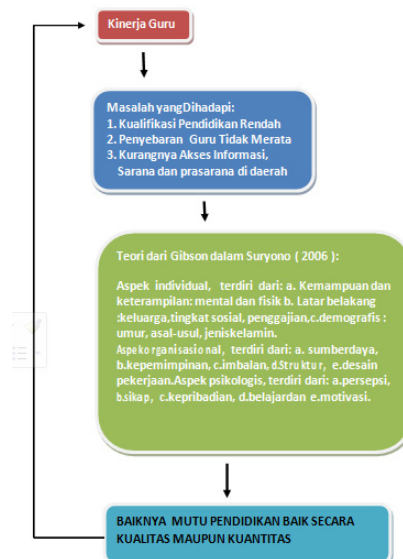




Foto : SekolahDasar.Net

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti memilih metode dan teknik penelitian karena masalah yang dikaji menyangkut masalah yang sedang berkembang dalam kehidupan, khususnya UPTD Karang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Pendekatan fenomenologi, diharapkan deskripsi atas fenomena yang tampak di lapangan dapat diinterpretasi makna dan isinya secara mendalam. Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu rumpun penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan salah satu ilmu tentang fenomena atau yang nampak, untuk menggali esensi makna yang terkandung di dalamnya.

Informan penelitian yang menjadi sasaran (target) penelitian ini adalah guru sekolah dasar di wilayah UPTD Karang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu. Guru sekolah dasar yang berada di wilayah UPTD Karang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu secara geografis memang cukup berjauhan antar sekolah, belum lagi transportasi yang sulit. Belum lagi kemajemukan tentang tingkat pendidikan guru-guru di wilayah UPTD Karang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah angket berupa isian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Instrumen penelitian ada yang berbentuk Pedoman Wawancara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang langsung berhadapan dengan informan itu sendiri. Peneliti perlu menemui informan untuk mengadakan wawancara langsung dengan informan. Setelah wawancara selesai, peneliti memverifikasi apakah hasil wawancara sudah benar. Jika sudah benar, peneliti meminta tanda tangan informan, sebagai tanda wawancara selesai dan isi wawancara sesuai dengan instrumen pedoman wawancara.

C. HASIL PENELITIAN

Dari 12 sekolah dibagi menjadi 2 kelompok guru yang dinilai kinerjanya, yaitu guru yang bersertifikasi berjumlah 48 orang dan guru yang belum bersertifikasi berjumlah 48 orang. Hal tersebut terlihat bahwa kinerja guru yang sudah disertifikasi dan belum bersertifikat secara keseluruhan bernilai baik. Guru yang dinilai oleh kepala sekolah / pengawas atau guru senior pada umumnya bernilai baik bahkan ada yang amat baik. Penilaian itu dilakukan oleh asesor kepada asesi berdasarkan kewajiban. Kewajiban semua guru harus dinilai kinerjanya. Hasil penilaian diberi saja yang penting nilai baik berarti kinerjanya baik. Penilaian itu tertuang di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dimana penilaian kinerja pegawai yang menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Penilaian kinerja guru (PK-Guru) di wilayah UPTD Karang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak selalu mengupayakan untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Sinergi tersebut tampak jelas pada pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang penilaian kinerja guru, pemantauan dalam proses belajar mengajar dan pembinaan berkelanjutan. Hal itu tampak jelas pada hasil wawancara pelaksanaan kegiatan yang secara sinergis antara kepala sekolah, pengawas sekolah dan kepala UPTD Karang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.

Hasil Penilaian Kinerja Bagi Guru sekolah dasar di Wilayah UPTD Karang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak yang Sudah Sertifikasi guru yang memiliki nilai amat baik berjumlah 15 orang = 31,25% dan yang bernilai baik berjumlah 33 orang = 68,75%, dan tidak seorangpun yang bernilai sedang atau cukup, dan hasil kinerja guru dinyatakan secara umum baik walau ada yang amat baik. Sedangkan guru yang belum sertifikasi, yang memiliki nilai amat baik berjumlah 13 orang = 27,08% dan yang bernilai baik ber-

jumlah 35 orang = 72,92%, dan tidak seorangpun yang bernilai sedang atau cukup, dan hasil kinerja guru dinyatakan secara umum baik walau ada yang amat baik.

Penilaian kinerja guru (PK-Guru) sudah tepat sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah karena asesor telah mendapatkan pelatihan dari UPTD Karanganyar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mompowah Hulu, Kabupaten Landak. Di sekolah semua kepala sekolah mengadakan penilaian kinerja guru, sekalipun kepala sekolah dibantu oleh guru atau pengawas sekalipun belum memiliki sertifikat asesor PK-Guru namun sudah dilatih sebagai penilai kinerja guru. Kepala sekolah memberikan penilaian kinerja guru (PK-Guru) merupakan kewajiban untuk menilai kinerja semua guru. Hasil penilaian dinyatakan benar karena sesuai prosedur, dengan instrumen penilaian dan langkah-langkah penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru berdasarkan langkah-langkah, yang diawali dengan pertemuan awal atau formatif yang merupakan evaluasi diri. Hal ini bertujuan mempersiapkan diri guru untuk pembimbingan sebelum diadakan penilaian akhir. Langkah kedua pembimbingan selama jeda antara formatif dan sumatif. Langkah terakhir yaitu sumatif yaitu penilaian PK-Guru melalui proses pemantauan, setelah pemantauan selesai diadakan pertemuan akhir antara asesori dan asesor untuk menyamakan persepsi, sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif.

Pembinaan yang dilakukan oleh UPTD Karanganyar Dikbud Kecamatan Mompowah Hulu melalui 3 aspek : (1) cara pembinaan, (2) jenis dan bentuk pembinaan, dan (3) tindak lanjut pembinaan. Aspek pertama yaitu cara pembinaan yang dilakukan oleh (1) kepala sekolah berupa individu atau kelompok guru (2) Pengawas melalui pembinaan individu atau kelompok guru, (3) pembinaan oleh UPTD Karanganyar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mompowah Hulu, Kabupaten Landak berupa individu atau kelompok. Aspek kedua yaitu jenis dan bentuk pembinaan oleh (1) kepala sekolah yaitu bentuk supervisi klinis atau supervisi kelas pada masing-masing guru mata pelajaran atau guru kelas, kegiatan berupa KKG sekolah, IHT atau workshop atau bimbingan teman sejawat, (2) Pembinaan pengawas berbentuk supervisi klinis atau supervisi kelas pada guru atau kepala sekolah binaan dan pembinaan oleh pengawas sekolah dapat berbentuk IHT sekolah dalam satu gugus, KKG Gugus, serta workshop dalam satu gugus. (3) UPTD Karanganyar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mompowah Hulu, Kabupaten Landak memberikan pembinaan secara kelompok dalam bentuk sosialisasi, IHT atau workshop.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dianalisis dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dari analisis tersebut, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Guru sekolah dasar di wilayah UPTD Karanganyar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mompowah Hulu, Kabupaten Landak berkinerja baik. (2) UPTD Karanganyar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mompowah Hulu, Kabupaten Landak untuk meningkatkan kinerja guru sekolah dasar melalui Kegiatan workshop, IHT dan kegiatan tersebut dilakukan bersinergi dengan KKKS Kecamatan Mompowah Hulu. (3) Strategi yang dilakukan untuk pembinaan pada guru-guru UPTD Karanganyar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Mompowah Hulu, Kabupaten Landak meningkatkan kinerja guru sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan individu atau kelompok dalam bentuk sosialisasi, IHT dan workshop.

2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui penilaian kinerja guru (PK-Guru) memacu

pengembangan diri seorang guru lebih terbuka dan diketahui sedini mungkin untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan agar lebih baik lagi. Penilaian kinerja guru (PK-Guru) dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan penggunaan instrumen yang baik dapat menghasilkan penilaian yang benar dan objektif, serta diketahuinya kelemahan seorang guru berdasarkan penilaian setiap indikator yang terendah. Dari Instrumen PK-Guru, guru dapat memahami evaluasi dirinya tentang kekuatan dan kelemahan, sehingga guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran. Guru yang memahami tentang evaluasi dirinya akan mampu meningkatkan pembelajaran sehingga mutu pendidikan meningkat.

C. SARAN

Berdasarkan uraian yang termuat dalam simpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : (1) Saran ditujukan pada guru, Guru hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya agar bekerja lebih efektif dan berhasil sehingga berkinerja baik. Seperti yang tertuang dalam penelitian menyatakan kinerja guru bernilai baik bahkan ada yang bernilai amat baik, baik yang sudah sertifikasi maupun belum bersertifikasi. (2) Setelah diketahui kinerja yang dinilai baik disarankan agar guru memahami butir-butir indikator setiap kompetensi yang rendah untuk diperbaiki, alhasil agar mutu pendidikan meningkat.

Daftar Pustaka

- Berk, R.A. 1986. Performance Assessment. London: The Johns Hopkins Press Ltd
- Byars, Lloyd L. & Rue, Leslie W. 1991. Human Resource Management. Third Edition. Boston: Irwin Inc
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. 1982. Qualitatif Research for Education, Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Bernardin J dan Russel J. (2002). Human Resource Management. Mc Graw-Hill International Edition.
- Danim. Sudarwan. 2002. Inovasi Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Setia. Goleman
- Dawood, 2007. "Skill Premiums of Trading in International Markets and Equity: Some Lessons for Pro Poor Education Policies in Developing Countries .
- Dedi Supriadi. 1999. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta : Adi Citra Karya Nusa.
- Dessler, Gary. 2010. Manajemen SDM buku 1. Jakarta : Indeks
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, Jr. J. H., & Konopaske, R., 2006 Organizations: Behavior, Structure, Process. Twelfth Edition. New York: McGraw-Hill Education
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Goetsch, David L. dan Stanley B. Davis. 2002. Total Quality Management, diterjemahkan oleh Benyamin Molan. Total Kualitas Manajemen. Jakarta: Prenhallindo.
- *. Penulis adalah Widyaiswara Madya pada LPMP Kalimantan Barat.

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM KURIKULUM SEKOLAH

Oleh : Kristianus Pijan, S.Pd*

Meskipun belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan formal atau masuk dalam kurikulum sekolah akan tetapi banyak yang merasa bahwa saat ini pendidikan anti korupsi sangat penting dimasukkan dalam kurikulum sekolah mengingat maraknya korupsi yang terjadi saat ini khususnya dikalangan para pejabat pemerintah kita. Sebenarnya bukan hanya terjadi dikalangan para pejabat pemerintah saja korupsi sudah masuk kekalangan masyarakat kecil.

Tujuan pendidikan antikorupsi adalah memberikan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika kita mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Atas dasar ini penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara membudayakan antikorupsi di Indonesia. Selain itu juga pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupannya di kemudian hari secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak. Pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa lembaga pendidikan menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi sangat diperlukan bagi segenap anak bangsa untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kepada anak-anak didik sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan antikorupsi di sekolah hendaknya memperhatikan kebutuhan siswa.

Mengapa pendidikan antikorupsi itu penting karena korupsi bisa dikatakan sebagai racun dimana dampaknya bisa merusak segala sendi kehidupan korupsi dipandang sebagai perilaku yang berakibat pada kerusakan tatanan sosial ekonomi dan budaya serta mutu kehidupan masyarakat suatu bangsa. Akibat dari tindakan korupsi adalah ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan anggaran negara, larinya modal keluar negeri gangguan penanaman modal ketimpangan sosial hilangnya wibawa pemerintah dan bisa juga hilangnya bantuan luar negeri. Selain itu, meningkatnya kasus korupsi juga dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya moralitas atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma kehidupan, tidak memiliki budaya malu, tidak taat hukum, sikap mental yang tidak baik, tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kehidupan dapat menciptakan tekanan situasional yang signifikan karena pada suatu saat manusia akan diuji tentang etika dan kejujurannya. Tekanan situasional tersebut dapat berupa tekanan keuangan, tekanan keuangan dapat menyebabkan seseorang melakukan korupsi karena serakah, gaya hidup melebihi kemampuan, memiliki utang atau mengalami kerugian keuangan yang cukup besar dan kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Kejahatan muncul bukan karena niat dari pelaku melainkan karena ada kesempatan atau peluang. Begitu juga

halnya dengan koruptor melakukan perbuatan tersebut karena adanya peluang untuk melakukannya. Oleh karena itu hendaknya pendidikan anti korupsi hendaknya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajaran. Kurikulum merupakan sekumpulan silabus yang tercetak atau uraian mengenai satu demi satu pelajaran yang disertai pengan-



tar bersifat umum mengenai tujuan pendidikan secara keseluruhan, dan ikhtiar singkat mengenai tujuan masing-masing mata pelajaran. Dengan begitu maka kurikulum adalah salah satu komponen yang urgensitasnya sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Untuk itu ketika kurikulum disusun oleh lembaga pendidikan seharusnya kurikulum disusun sesuai dengan realita yang ada. Sehingga dalam penyusunan kurikulum perlu pertimbangan kebutuhan permintaan dan atau harapan masyarakat akan output pendidikan. Dengan begitu lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan menjadi tidak teralienasi dengan masyarakat ketika mereka berbaur dalam lingkungan yang baru.

Kurikulum yang bagus adalah tipe "core curriculum" yaitu sejumlah pengalaman belajar bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Oleh karena sifat kurikulum yang tidak baku dan dapat direvisi ini maka jenis yang memadai adalah kurikulum yang bersifat dari pengalaman. Untuk menuju ke integrasi problematika korupsi terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan diperlukan upaya yang kreatif karena banyak sekali hambatan dan tantangan dalam situasi koruptif yang telah langgeng tentu diperlukan refleksi kritis dan penciptaan kurikulum yang bisa memproduksi manusia-manusia yang antikorupsi.

Ada tiga pokok yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum anti korupsi di segala tingkat. Pertama tujuan hakikat dan kebutuhan peserta didik harus terhindar dari sikap korupsi. Kedua hakikat dan kebutuhan masyarakat dimana peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang menentang korupsi. Ketiga, masalah pokok yang ditujukan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan dengan masyarakat. Buku-buku pelajaran cenderung normatif tidak diambil serta dikembangkan semangat berpikirnya seperti kenapa terjadi budaya korupsi, nepotisme dan sebagainya. Sementara para pendidik sendiri hanya mencukupi diri dengan berpedoman kepada buku-buku tersebut tanpa pernah mengajarkan peserta didik bagaimana metode berpikir dan strategi menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi.

Untuk itu kurikulum pendidikan perlu dilakukan karena dapat membangun peradaban masyarakat yang kritis, yang lebih adil, lebih manusiawi terutama pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Singkatnya sistem kurikulum pendidikan pada masa kini dan mendatang harus lebih antisipatif terhadap problematika yang sedang berkembang.

Pendidikan formal dalam upaya mencegah korupsi akan memiliki kedudukan strategis karena sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat. Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah pembentukan pengeta-

huan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, mengubah sikap dan persepsi terhadap korupsi, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Untuk manfaat jangka panjang pendidikan korupsi bisa menjamin keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program anti korupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah di dalam sendi-sendi kehidupan. Pendidikan antikorupsi pada dasarnya telah disisipkan pada mata pelajaran yang ada di sekolah khususnya pada mata pelajaran PKN. Sebenarnya banyak pilihan untuk penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah salah satunya dengan menerapkan pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata pelajaran untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Dengan demikian pendidikan antikorupsi membimbing peserta didik untuk berfikir terhadap nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat setempat. Dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) secara rinci tersurat tentang anti korupsi karena memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar tentang (1) mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (2) mendeskripsikan pengertian antikorupsi dan instrumen antikorupsi di Indonesia. Dengan demikian kurikulum tentang antikorupsi hanya pada mata pelajaran PKN saja.

Selain metode pembelajaran secara formal dan informal pendidikan antikorupsi di sekolah bisa dilakukan dengan cara penyadaran praktiknya yang kerap dilakukan oleh sekolah adalah dengan model ujian kejujuran karena memberantas korupsi haruslah dimulai dari penanaman sikap yang harus ditanamkan sejak dini dalam praktik keseharian. Kejujuran harus dimulai dari tingkat sekolah supaya para individu terbiasa berbuat kejujuran tujuannya adalah menanamkan kepada peserta didik tentang arti sebuah kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu model atau strategi praktik pendidikan anti korupsi bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Nantinya peserta didik akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu ingin menerapkan kejujuran hati nurani atau tidak. Mentalitas siswa masih menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan kejujuran di sekolah.

Apabila peserta didik sejak dini memiliki dan mampu menerapkan nilai kejujuran di dalam kesehariannya diharapkan untuk jangka waktu kedepan mereka mampu senantiasa berperilaku jujur. Kejujuran adalah nilai hidup yang bersifat universal setiap orang dari semua bangsa dan agama mengenal kejujuran walaupun tidak setiap orang sanggup dan berani melakukannya.

Mengajarkan nilai-nilai kejujuran sifatnya berjenjang sesuai dengan usia perkembangan seseorang. Secara psikologi diketahui bahwa proses perkembangan moral adalah proses perkembangan otak jadi kalau sejak dini kita ajarkan antikorupsi dan kejujuran pada anak didik maka akan berpengaruh pada perkembangan sifat dan moral anak itu sendiri. Karena itu perkembangan moral berhubungan erat dengan perkembangan kognitif seseorang. Anak-anak dan remaja membentuk pemikiran moral mereka seiring dengan perkembangan mereka dari tahap yang satu ketahap berikutnya dan bukan hanya bersifat pasif dengan menerima saja moralitas suatu kebudayaan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut usia 2 sampai 7 tahun seorang anak belum mampu membuat pertimbangan-pertimbangan tentang baik atau buruknya suatu perbuatan. Mereka patuh untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu tujuannya untuk menyenangkan orang tua dan mendapat pujian serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang karena takut akan hukuman. Mengajar anak kejujuran dalam fase ini dapat dilakukan terutama melalui penguatan positif terhadap kejujuran, dengan memuji dan menghargai perbuatan dan kejujurannya. Usia 7 sampai 10 tahun konsep kejujuran mulai dapat diajarkan demikian juga konsep tentang ketidakjujuran dan akibatnya.

Hati nurani anak mulai terbentuk dan anak mulai mengetahui tentang baik buruknya suatu perbuatan. Mengajar anak dalam fase ini dengan peneladanan dan penguatan positif dan negatif, juga melalui cerita dan kasus nyata yang dapat dibayangkan anak. Usia 11 sampai 13 tahun anak dapat berpikir kearah abstrak dan sanggup melihat dari sudut pandang orang lain. Usia 13 sampai dewasa telah sanggup berfikir abstrak dan membuat hipotesa. Mereka mempunyai standar ten-

tang yang baik atau buruk suatu perbuatan dari diri mereka sendiri.

Melalui pendidikan anti korupsi nantinya bisa menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bertindak jujur dalam bekerja agar tidak melakukan tindakan korupsi ketika nanti menduduki posisi strategis disebuah institusi atau menjabat posisi penting disebuah perusahaan mengapa ini penting karena banyak fakta menunjukan bahwa orang berpendidikan tinggi rentan terhadap godaan korupsi karena mereka biasa menduduki posisi strategis.

Pelajar merupakan aset bangsa harapan masa depan baik buruknya generasi dimasa yang akan datang tentu dapat dilihat dari baik buruknya kualitas pemuda masa kini. Oleh karena itu banyak muncul pendidikan karakter yang mengarah pada pendidikan anti korupsi dalam lingkup pendidikan yang digadang-gadang mampu mengantarkan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa berkepribadian bersih. Untuk berperan dalam pemberantasan korupsi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para pelajar tentunya setelah mereka memahami tentang pendidikan anti korupsi. Hal yang paling mudah adalah mengarahkan diri sendiri untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat sebagai bekal dalam menghadapi realita kehidupan dimasa yang akan datang.

Jika dianalisa banyak dari pemuda jaman sekarang yang mengaku berjiwa pancasila dan cinta tanah air tetapi hal tersebut tidak dibuktikan dengan tindakan melainkan hanya dimulut saja merek mencibir pemimpin yang korup tapi tindakan mereka tidak ada bedanya dengan para pemimpin yang tidak dapat menjadi panutan semisal anarkis, miras, dan narkoba. Sebagai calon pemimpin bangsa para pemuda harus berpendidikan. Berpendidikan tidak hanya dengan sekolah yang tinggi tetapi juga memiliki pikiran dan tindakan yang terpelajar pula. Pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi bisa didapat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah sebagai awal untuk melawan korupsi seorang pelajar harus membiasakan diri disiplin.

Secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah pertama membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya kedua mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi ketiga pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dengan begitu diharapkan generasi baru mampu berperan dan berfungsi sebagai penggalang gerakan anti korupsi di Indonesia. Adapun manfaat dari pendidikan anti korupsi secara jangka panjang adalah menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah di dalam sendi-sendi kehidupan.

Manfaat pendidikan korupsi tidak hanya diperuntukkan untuk peserta didik namun juga untuk pendidik. Untuk peserta didik akan memiliki wawasan tentang korupsi dan memiliki perilaku anti korupsi baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga, atau lingkungan masyarakat. Sedangkan bagi tenaga pendidik si pengajar akan termotivasi menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat untuk berperilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memang mengubah karakter seseorang supaya menjadi lebih baik. Pendidikan anti korupsi tidak jauh berbeda dengan pendidikan karakter, karena karakter sang peserta didik harus disadarkan dan dipahami dahulu mengenai apa itu korupsi dan apa efek bahaya anti korupsi. Jadi tentu saja tujuan dan manfaat utamanya adalah untuk membentuk karakter dari diri individu karakter berhubungan erat dengan mental. Dengan memahami karakter diri mental seseorang akan menjadi lebih kuat fungsi kekuatan mental jelas adalah untuk melawan tindakan korupsi.

Karakter mungkin hanya berpengaruh pada pribadi seseorang namun dengan mental anti korupsi seseorang bisa mengajak orang lain untuk melawan korupsi. Dengan mental baja bukan mental tempe jika seseorang melihat kasus korupsi di lingkungannya ia tidak akan diam namun ia bisa mengatakan tidak untuk korupsi bahkan melawan.

*Penulis adalah Guru SMPNegeri 5 Kelay Permai, Kabupaten Sintang

PENERAPAN METODE INKUIRI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN HASIL BELAJAR PKn SISWA KELAS VIII F SMP NEGERI 1 SANGGAU

Oleh : Yanti Lestari, S.Pd
(Guru SMPN 1 Sanggau)

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Trowbridge (1990, (dalam)Putrayasa.; 2001: 21), model inkuiri adalah sebuah model proses pengajaran yang berdasarkan atas teori belajar dan perilaku. Inkuiri merupakan suatu cara mengajar murid-murid bagaimana belajar dengan menggunakan keterampilan, proses, sikap, dan pengetahuan berpikir rasional. Beberapa model pembelajaran telah diterapkan guru di sekolah-sekolah dengan tujuan agar siswa merasa nyaman dan semangat belajar di kelas. Selama ini siswa sering merasa bosan dan jenuh karena berhadapan dengan guru yang hanya bisa ceramah tanpa variasi model pembelajaran yang menarik.

Di SMP Negeri 1 Sanggau terutama di kelas VIII F terdapat banyaknya siswa yang belum paham terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa yang tidak sesuai dengan harapan. Terlihat jelas bahwa setiap dilakukan latihan maupun ulangan nilai siswa hampir semuanya tidak tuntas. Dari permasalahan yang ditemukan di kelas VIII F mendorong keinginan untuk bagaimana caranya supaya siswa menjadi paham sehingga hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan harapan.

Dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dilihat bahwa sebagian besar siswa kurang atau tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Namun pada saat mencoba membangkitkan keingintahuan (*curiosity*) siswa, mereka mulai aktif dalam pembelajaran. Sehingga untuk sementara disimpulkan bahwa perlu menggunakan metode yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Metode ceramah yang selama ini digunakan seperti ini menimbulkan kesan bahwa PKn adalah mata pelajaran yang membuat siswa menjadi pendengar yang baik, bukan sebagai 'pelaku' di dalam kelas, atau dalam kehidupan yang lebih luas dalam hal ini adalah kehidupan sosial masyarakat.

Siswa masih merasa kesulitan, takut dan kurang berani bertanya terhadap hal-hal yang belum dipahami, sementara itu guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Keadaan ini jika dibiarkan maka nilai pelajaran PKn akan semakin menurun dan gagal dalam memperoleh nilai ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Untuk mengatasi masalah tersebut seorang guru harus mampu memberikan motivasi terhadap siswa melalui pengelolaan kelas yang menarik dan melibatkan siswa dalam menemukan konsep.

Dalam pembelajaran guru perlu menggunakan keterampilan, proses, sikap dan kemampuan berpikir rasional. Guru harus berusaha maksimal, mulai dari persiapan RPP, media hingga strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas. Namun disisi lain memang masih cenderung menggunakan metode mengajar yang monoton yaitu metode ceramah, kondisi ini ternyata membuat siswa menjadi bosan, jenuh dan tidak tertarik untuk belajar. Guru kurang mampu mengelola kelas dengan baik, sehingga banyak diantara siswa yang acuh tak acuh terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru bahkan sebagian diantaranya lebih sering mengerjakan tugas lain. Rendahnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai-nilai latihan yang dilaksanakan setiap pertemuan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan baik oleh siswa maupun guru. Guru hendaknya mengemas proses belajar mengajar dengan metode yang tepat dan menarik dalam penyajiannya. Salah satu langkahnya adalah menggunakan metode bervariasi yang tepat yaitu dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri. Pembelajaran inkuiri membuat siswa untuk bisa mencari dan menyelidiki suatu masalah



dengan cara yang sistematis, kritis, logis dan dianalisis dengan baik. Model pembelajaran ini akan membuat siswa lebih banyak berdiskusi untuk memecahkan masalah. Menurut Holstein (1986: 67) media akan memperjelas dan membuat pelajaran menjadi lebih konkrit dan jelas bagi siswa.

Model pembelajaran inkuiri sangat cocok diterapkan pada mata pelajaran PKn khususnya materi tentang demokrasi karena pada saat diskusi siswa dapat memberikan contoh-contoh dalam pelanggaran yang dilakukan pada saat demonstrasi. Selain itu siswa dapat menjelaskan dari gambar yang berkaitan dengan materi demokrasi. Model pembelajaran ini tidak hanya mengedepankan perkembangan intelektual siswa tetapi juga perkembangan emosional dalam memecahkan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembelajaran melalui penerapan metode inkuiri pada siswa kelas VIII F SMPN1 Sanggau pada mata pelajaran PKn ?
2. Bagaimanakah peningkatan pemahaman pada siswa kelas VIII F SMPN1 Sanggau pada materi Demokrasi di Indonesia ?
3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar pada siswa kelas VIII F SMPN1 Sanggau melalui implementasi pembelajaran berbasis inkuiri ?
4. Bagaimanakah respon terhadap penerapan pembelajaran melalui metode inkuiri pada siswa kelas VIII F SMPN 1 Sanggau ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran melalui penerapan pembelajaran melalui metode inkuiri pada siswa kelas VIII F SMPN 1 Sanggau.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah peningkatan pemahaman siswa melalui metode inkuiri pada siswa kelas VIII SMPN1 Sanggau.
3. Untuk mengetahui sejauh manakah peningkatan hasil belajar melalui metode inkuiri pada siswa kelas VIII SMPN 1 Sanggau.
4. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan pembelajaran

ran melalui metode inkuiri pada siswa kelas VIII SMPN 1 Sanggau.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat, baik bagi siswa, guru, maupun guru lain.

a. Bagi siswa :

Dapat meningkatkan keberanian siswa bertanya, menjawab, dan mengemukakan pendapat, makna pembelajaran bagi siswa, dan meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa tentang materi demokrasi.

b. Bagi guru:

Dapat meningkatkan keterampilan, pengembangan pendekatan, metode atau model dalam proses pembelajaran di kelas.

c. Bagi guru lain :

Dapat meningkatkan pemahaman tentang penelitian dan menumbuhkan minat untuk melakukan penelitian.

d. Bagi satuan pendidikan

Dapat meningkatkan keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Metode Inkuiri

Metode inkuiri adalah suatu cara menyampaikan pelajaran dengan penelaahan sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, analisis, dan argumentatif dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju kesimpulan (Usman, 1993:124). Berikut ini akan dikemukakan langkah-langkah belajar mengajar dengan model inkuiri sebagai berikut :

1. Menghadapi stimulus (terencana atau tidak terencana)
2. Menyajikan reaksi terhadap situasi yang merangsang
3. Merumuskan tugas yang dipelajari dan mengorganisasikan kelas
4. Belajar menyelesaikan masalah secara independen atau kelompok
5. Menganalisa proses dan kemajuan kegiatan belajar
6. Evaluasi dan tindak lanjut (Gulo, 2004:98)

2. Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Materi Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah :

a. Siklus I

Pada siklus I ini diberikan materi “ Menjelaskan Hakikat Demokrasi “.

b. Siklus II

Pada siklus II diberikan materi “ Pentingnya Kehidupan Demokrasi Dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara “.

3. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatukan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya (Sadiman, 1996 : 109).

4. Hasil Belajar

Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Inkuiri

Model inkuiri didefinisikan oleh Sund dan Trowbridge (1973) dalam Putrayasa (2001) sebagai: Pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri; dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain.

Dahar (2012) mendefinisikan model inkuiri sebagai pengajaran

dimana guru dan anak mempelajari peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuwan. Pengajaran berdasarkan inkuiri adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa dimana kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas.

Sementara itu, Trowbridge (1990, (dalam) Putrayasa, 2001) menjelaskan model inkuiri sebagai proses mendefinisikan dan menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menemukan data, dan menggambarkan kesimpulan masalah-masalah tersebut. Hal senada dikatakan oleh Roestiyah (1998) mengatakan bahwa inkuiri adalah suatu perluasan proses *discovery* yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. Sebagai tambahan pada proses *discovery*, inkuiri mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, menumbuhkan sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka dan sebagainya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa inkuiri merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam model inkuiri ini siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Dengan demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti teliti, tekun/ulet, objektif/jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain.

B. Tingkatan Pemahaman Siswa Terhadap Materi Ajar

Tingkatan pemahaman (*the levels of understanding*) pada pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua. Menurut Skemp (1976) dalam Wahyudi (2001). Tingkatan pemahaman yang pertama disebut pemahaman instruksional (*instructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa siswa baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, siswa pada tahapan ini juga belum atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Selanjutnya, tingkatan pemahaman yang kedua disebut pemahaman relasional (*relational understanding*). Pada tahapan tingkatan ini, menurut Skemp, siswa tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, dia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.

Menurut Byers dan Herscovics (1977) dalam Wahyudi (2001) menganalisis ide Skemp itu dan mengembangkannya lebih jauh yaitu, siswa terlebih dahulu berada pada tingkatan pemahaman antara tingkatan pemahaman intuitif (*intuitive understanding*) dan tingkatan pemahaman formal (*formal understanding*). Pertama, sebelum sampai pada tingkatan pemahaman instruksional, siswa terlebih dahulu berada pada tingkatan pemahaman intuitif. Mereka mendefinisikannya sebagai berikut. “*Intuitive understanding is the ability to solve a problem without prior analysis of the problem.*” Pada tahap tingkatan ini siswa sering menebak jawaban berdasarkan pengalaman-pengalaman keseharian dan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Akibatnya, meskipun siswa dapat menjawab suatu pertanyaan dengan benar, tetapi dia tidak dapat menjelaskan kenapa (*why*). Kedua, sebelum siswa sampai pada tingkatan pemahaman relasional, biasanya mereka akan melewati tingkatan pemahaman antara yang disebut dengan pemahaman formal.

C. Pengertian Hasil Belajar

Untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka perlu diadakan tes hasil belajar. Menurut pendapat Winata Putra dan Rosita (1997:191) tes hasil belajar adalah salah satu alat ukur yang

paling banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam suatu proses belajar mengajar atau untuk menentukan keberhasilan suatu program pendidikan. Adapun dasar-dasar penyusunan tes hasil belajar adalah sebagai berikut:

- Tes hasil belajar harus dapat mengukur apa-apa yang dipelajari dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku.
- Tes hasil belajar disusun sedemikian sehingga benar-benar mewakili bahan yang telah dipelajari.
- Bentuk pertanyaan tes hasil belajar hendaknya disesuaikan dengan aspek-aspek tingkat belajar yang diharapkan.
- Tes hasil belajar hendaknya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar.

Tabrani (1992;3) mengatakan bahwa belajar mengajar adalah suatu proses yang rumit karena tidak sekedar menyerap informasi dari guru, tetapi melibatkan berbagai kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil yang lebih baik.

D. Tipe Hasil Belajar

Menurut Nana Sudjana (1988;49), tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam suatu pengajaran terdiri dari 3 macam yaitu: bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan yang harus nampak sebagai hasil belajar. Nana Sudjana (1988;50-54) juga mengemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga aspek pengajaran adalah sebagai berikut :

Tipe hasil belajar bidang kognitif

Tipe ini terbagi menjadi 6 poin, yaitu tipe hasil belajar :

- Pengetahuan hafalan (Knowledge), yaitu pengetahuan yang sifatnya faktual. Merupakan jembatan untuk menguasai tipe hasil belajar lainnya.
- Pemahaman (konprehention), kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep
- Penerapan (aplikasi), yaitu kesanggupan menerapkan dan mengabstraksikan suatu konsep. Ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru, misalnya memecahkan persoalan dengan menggunakan rumus tertentu.
- Analisis, yaitu kesanggupan memecahkan, menguasai suatu integritas (kesatuan yang utuh) menjadi unsur atau bagian yang mempunyai arti .
- Sintesis, yaitu kesanggupan menyatukan unsur atau bagian menjadi satu integritas.
- Evaluasi, yaitu kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan pendapat yang dimilikinya dan kriteria yang dipakainya.

Tipe hasil belajar afektif

Bidang afektif disini berkenaan dengan sikap. Bidang ini kurang diperhatikan oleh guru, tetapi lebih menekankan bidang kognitif. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli yang mengatakan, bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila seseorang telah menguasai bidang kognitif tingkat tinggi.

Beberapa tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe hasil belajar dari yang sederhana ke yang lebih kompleks yaitu :

- Receiving* atau *attending*, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang pada siswa, baik dalam bentuk masalah situasi dan gejala.
- Responding* atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seseorang terhadap stimulus dari luar .
- Valuing* atau penilaian, yakni berhubungan dengan nilai dan kepercayaan terhadap stimulus.
- Organisasi, yakni pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi, termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan nilai lainnya dan kuantitas prioritas yang dimilikinya .

- Karakteristik nilai atau internalisasi, yakni keterpaduan dari semua nilai yang dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.

Tipe hasil belajar bidang psikomotor

Hasil belajar bidang psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan, kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan keterampilan yaitu :

- Gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan tidak sadar.
- Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar.
- Kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, adaptif, motorik, dan lain-lain.
- Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan keharmonisan dan ketetapan.
- Gerakan-gerakan *skill*, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks.
- Kemampuan yang berkenaan dan komunikasi *non decorsive* seperti gerakan ekspresif, *interpretative*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Subyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Sanggau, yang beralamat di Jl. K. H. Dewantara nomor 4. Adapun subyek penelitian adalah siswa kelas VIII F SMPN1 Sanggau, sebanyak 32 siswa.

B. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan tahun ajaran 2014/2015 pada semester kedua.

- Persiapan pada bulan Januari Minggu pertama tanggal 10 tahun 2015.
- Pelaksanaan tindakan I pada bulan Januari Minggu kedua tanggal 17 tahun 2015.
- Pelaksanaan tindakan II pada bulan Februari Minggu kedua tanggal 14 tahun 2015.
- Pengumpulan data pada bulan Februari Minggu ketiga tanggal 21 dan Minggu keempat tanggal 28 tahun 2015.
- Pelaporan dilakukan pada bulan Maret Minggu pertama tanggal 7 dan Minggu kedua tanggal 14 tahun 2015.

Tabel
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu											
		Januari				Februari				Maret			
		Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	√											
2	Pelaksanaan tindakan I		√										
3	Pelaksanaan tindakan II						√						
4	Pengumpulan data							√	√				
5	Pelaporan									√	√		

C. Rancangan Penelitian

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dengan kegiatan berulang-ulang atau ber-siklus, dalam rangka memecahkan masalah, sampai masalah itu dipecahkan. Dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), guru dapat meneliti sendiri terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara langsung, sehingga bila guru menemukan permasalahan dalam pembelajaran guru dapat merencanakan tindakan alternatif, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi apakah tindakan alternatif tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

Penelitian tindakan kelas lebih bertujuan untuk memperbaiki kinerja, sifatnya realistik dan hasilnya tidak untuk digeneralisasi. Namun hasil penelitian dapat diterapkan oleh orang lain yang mempunyai konteks yang sama. Dalam buku Pedoman Teknis Pelaksanaan *Classroom Action Research* (CAR) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK Depdiknas (2001:5) disebutkan penelitian bersiklus, tiap siklus terdiri dari :

- a) Persiapan/perencanaan (*Planning*)
- b) Tindakan/pelaksanaan (*Acting*)
- c) Observasi (*Observing*)
- d) Refleksi (*Reflecting*)

a. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari 2 siklus yaitu :

1) Siklus I

a. Perencanaan (*Planning*)

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi bahan pembelajaran
2. Menyusun silabus dan RPP
3. Menyiapkan alat bantu pembelajaran
4. Menyiapkan lembar tes
5. Menyiapkan lembar observasi.

b. Tindakan / pelaksanaan (*Acting*)

Dalam tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang telah tertuang dalam rencana pembelajaran dengan modifikasi pelaksanaan sesuai dengan situasi yang terjadi :

Tindakan Siklus 1 dilaksanakan pada bulan Januari Minggu kedua tanggal 17 tahun 2015.

Pokok Bahasan : Demokrasi di Indonesia
Sub Pokok bahasan : Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Langkah-langkah tindakan:

Tahapan inkuiri	Kemampuan yang dituntut
1. Merumuskan masalah	1. kesadaran terhadap masalah 2. Melihat pentingnya masalah 3. Merumuskan masalah
2. Merumuskan jawaban sementara (hipotesis)	1. Menguji dan menggunakan jenis data yang dapat diperoleh 2. Melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis 3. Merumuskan hipotesis
3. Menguji jawaban tentatif	1. Mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan 2. Menyusun data 3. Mencatat persamaan dan perbandingan
4. Menarik kesimpulan	1. Mencari pola dan makna hubungan 2. merumuskan kesimpulan

Beberapa hal yang diharapkan dalam siklus ini adalah:

1. Siswa mengalami peningkatan minat belajar dan aktivitas di kelas selama guru melakukan kegiatan pembelajaran
2. Terdapat peningkatan konsentrasi belajar siswa sehingga aktivitas siswa menjadi terfokus dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru.
3. Siswa memiliki kemauan dan keberanian untuk bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang dialami pada saat menyelesaikan tugas yang diberikan.

c. Observasi (*Observing*)

Dalam tahap observasi perlu dilakukan pengamatan selama kegiatan berlangsung, juga teman, guru yang diminta bantuan untuk ikut mengamati selama kegiatan proses pembelajaran ber-

langsung dengan menggunakan lembar observasi keaktifan siswa dan lembar observasi aktifitas guru.

d. Refleksi (*Reflecting*)

Tahap ini merupakan tahap menganalisa, mensintesa, hasil dari catatan selama kegiatan proses pembelajaran menggunakan instrumen lembar pengamatan, kuesioner, dan tes. Dalam refleksi melibatkan siswa, teman sejawat yang mengamati dan kepala sekolah. Untuk melakukan perencanaan pada siklus berikutnya dan dikelompokkan masalah yang timbul pada pembelajaran siklus I.

2) Siklus II dilaksanakan pada bulan Februari Minggu kedua tanggal 14 tahun 2015

a. Persiapan/ perencanaan (*Planning*)

Sebelum melaksanakan tindakan siklus II, peneliti melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan temuan-temuan pada siklus I

b. Tindakan/ pelaksanaan (*Acting*)

Pokok Bahasan : Demokrasi di Indonesia

Sub Pokok bahasan : Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Langkah-langkah tindakan:

- Perumusan masalah untuk dipecahkan siswa.
- Menetapkan jawaban sementara .
- Guru mengajak siswa untuk mengenal cara berdemokrasi yang ada di sekolah.
- Guru mengajak siswa melakukan studi kelompok dalam rangka memahami dan mengenal lebih jauh tentang demokrasi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan disetiap kelompok diberikan tugas kelompok
- Siswa diharapkan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan mengerjakannya dengan berbagi tugas bersama rekan-nya dalam kelompok
- Siswa melaporkan hasil kerjanya ke depan kelas dan memulai diskusi bersama-sama, dalam siklus II ini guru mengurangi peran dan intruksinya kepada siswa, hanya mengamati dengan seksama bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya dan perubahan aktifitas siswa yang dialaminya
- Pada sesi akhir guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara bersama-sama.

Harapan yang dimungkinkan muncul dalam siklus II ini adalah bahwa :

1. Guru dapat mengelola kelas dengan lebih baik dan lebih mampu memahami siswa
2. Siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasinya dan penguasaan konsep materi pembelajaran
3. Partisipasi siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan yang baik

c. Observasi (*Observing*)

Pada tahap observasi dilakukan pengamatan selama kegiatan berlangsung, dengan menggunakan lembar keaktifan siswa.

d. Refleksi (*reflecting*)

Dari hasil pengamatan pada siklus kedua dapat digunakan untuk melakukan refleksi apakah hasil ulangan siswa sudah memenuhi ketuntasan secara klasikal maupun individual.

D. Perangkat penelitian

Dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas digunakan beberapa perangkat penelitian sebagai berikut :

a. Rencana Pembelajaran

Skenario pembelajaran dengan pokok bahasan perpangkatan dan akar yang berisi tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tentang bagaimana menerapkan metode variasi sehingga mampu meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran.

b. Media Pembelajaran

Alat bantu pembelajaran yang digunakan oleh yaitu gambar, dalam rangka mempermudah proses pembelajaran dengan metode variasi.

E. Instrumen Penelitian

Dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas menggunakan beberapa analisa, antara lain :

1. Lembar observasi

Lembar observasi guru digunakan untuk mengungkapkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran antara lain contoh lembar observasi seperti pada lampiran.

2. Soal tes

Tes hasil belajar berbentuk soal pilihan ganda dan uraian yang dikerjakan siswa didalam kelas. Soal tes dikerjakan secara individu oleh siswa. Tes digunakan untuk mendapatkan gambaran hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, tes diadakan setiap akhir siklus. Dari hasil tes pada siklus satu dan dua dapat ditarik kesimpulan ada tidaknya peningkatan hasil tes yang dilaksanakan. Data yang diperoleh dari hasil ulangan siswa digunakan untuk mengetahui hasil ketuntasan klasikal maupun individual.

3. Angket/ Kuisisioner

Angket diberikan setelah proses pembelajaran berakhir pada akhir siklus. Tujuannya untuk mengetahui respon siswa tentang kekurangan, kelebihan atau kendala yang ada serta saran siswa terhadap proses pembelajaran. Contoh angket dapat dilihat dalam lampiran.

F. Tehnik Analisis Data

Dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas teknik analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sebagai berikut :

1. Data hasil pemahaman Siswa dalam proses pembelajaran

Data hasil pemahaman siswa adalah data kegiatan siswa dalam proses pembelajaran selanjutnya diobservasi dengan mengkaitkannya dalam kategori;

Baik	apabila tercatat \geq	10 tally
Sedang	apabila tercatat \geq	6 tally
Rendah	apabila tercatat \leq	6 tally

Indikator observasi ini meliputi; memperhatikan penjelasan guru, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, mengerjakan soal ke papan tulis, diskusi dan menyelesaikan tugas mandiri.

2. Data Hasil belajar siswa

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini data diperoleh dari hasil latihan dan ulangan yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar.

3. Data Hasil Tes Belajar Siswa

Data hasil tes adalah data yang diperoleh setelah melakukan tes formatif terhadap siswa selesai proses pembelajaran. Tes belajar siswa dilakukan selama 2 (dua) kali, pada setiap siklus yang dilakukan. Dari hasil tes pada siklus satu dan dua nantinya akan dibandingkan sehingga dapat ditarik kesimpulan ada tidaknya peningkatan hasil tes yang dilaksanakan. Data yang diperoleh dari hasil ulangan siswa digunakan untuk mengetahui hasil ketuntasan klasikal maupun individual.

a). Ketuntasan secara individu

$$\frac{\text{Rumus persentase}}{\text{Jumlah skor yang diperoleh}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah skor maksimal}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100 \%$$

b) Ketuntasan secara klasikal

Rumus persentase ketuntasan :

$$\frac{\text{Jumlah siswa yang tuntas}}{\text{Jumlah seluruh siswa}} \times 100 \%$$

Ketuntasan belajar individu dinyatakan tuntas apabila tingkat persentase ketuntasan minimal mencapai 74 %, sedangkan untuk tingkat klasikal minimal mencapai 85 % (Depdikbud, 1994, dalam Kustantini:10).

4. Angket/ Kuesioner

Data yang diperoleh melalui angket siswa dianalisis dengan menggunakan jumlah responden yang telah menjawab setiap pertanyaan angket. Kategori jawaban terbagi menjadi 2 (dua) macam : ya dan tidak. Ada dalam lampiran.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, dimana tiap siklusnya terdiri dari satu tindakan yang diwujudkan dalam satu kali pertemuan pembelajaran yang lamanya 2 x 40 menit. Jadi pada penelitian tindakan kelas ini diadakan proses pembelajaran sebanyak dua pertemuan.

1. Pelaksanaan Siklus 1

1) Perencanaan (planning)

Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajak siswa bersama-sama mengamati gambar yang berkaitan dengan materi demokrasi. Guru dan siswa kemudian memperhatikan ilustrasi yang diberikan oleh guru. Guru meminta siswa menjelaskan kegiatan yang dapat terjadi. Guru membagi siswa dalam 5 (lima) kelompok. Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk menyusun bersama kelompoknya bagaimana peristiwa yang sesuai dengan materi kemudian siswa mensimulasikan didepan kelas. Setelah simulasi di kelas selesai dilakukan, guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dicatat dalam siklus 1 adalah sebagai berikut :

1. Temuan positif

- Melalui penggunaan metode inquiri ini siswa terlihat lebih bergairah dalam belajar.
- Dalam berdiskusi dan tanya jawab siswa terlihat mulai aktif, meski peran siswa masih kurang karena hanya beberapa orang saja yang terlihat bergairah mengikuti proses pembelajaran.
- Motivasi siswa dalam memahami Demokrasi di Indonesia yang terlihat dengan adanya beberapa siswa bertanya terkait dengan simulasi yang dilakukan oleh siswa-siswa yang lain.

2. Temuan negatif

- Sebagian siswa masih ada yang belum bisa menjelaskan kepada teman-temannya dalam menyampaikan pengalamannya.
- Kualitas tanya jawab dari hasil diskusi belum maksimal.

2) Pelaksanaan Siklus 2

1) Perencanaan (planning)

Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang tokoh penting yang berperan dalam memperjuangkandemokrasi di Indonesia. Setelah siswa menyelesaikan tugas yang diberikan, langkah selanjutnya yaitu memaparkan permasalahan dan siswa yang ditunjuk secara acak diminta untuk menanggapi permasalahan yang telah diberikan.

Guru meminta kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pendapat yang berbeda terhadap pendapat yang disampaikan kelompok lainnya. Siswa diharapkan menyele-

saikan tugas dengan tepat waktu dan mengerjakannya dengan berbagi tugas bersama rekannya dalam kelompok.

Siswa melaporkan hasil kerjanya ke depan kelas dan memulai diskusi bersama-sama, dalam siklus II ini guru mengurangi peran dan instruksinya kepada siswa, hanya mengamati dengan seksama bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya dan perubahan aktifitas siswa yang dialaminya. Pada sesi akhir guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara bersama-sama.

Setelah diskusi kelas selesai dilakukan, guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dicatat dalam siklus 2 adalah sebagai berikut :

1. Temuan positif

- Dalam berdiskusi dan tanya jawab siswa terlihat mulai aktif, meski peran siswa masih kurang karena hanya beberapa orang saja.
- Jumlah siswa yang aktif meningkat hal ini terlihat dengan adanya bertambahnya siswa yang bertanya.

2. Temuan negatif

- Pertanyaan siswa dalam diskusi kelas masih belum terarah, sehingga alur diskusi masih belum berjalan lancar. Dan masih didominasi oleh beberapa siswa yang nyata-nyata berprestasi.
- Sebagian siswa masih ada yang belum bisa menjelaskan kepada teman-temannya dalam menyampaikan pengalamannya.
- Kualitas tanya jawab yang dihasilkan dari hasil diskusi sudah maksimal.

B. Pengamatan tindakan (*observing*)

Pengamatan dilakukan pada setiap pelaksanaan tindakan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan instrumen yaitu: (1) pengamatan terhadap kreativitas siswa; (2) evaluasi pemahaman siswa; (3) angket untuk mengetahui dampak model pembelajaran dengan pendekatan inkuiri terhadap pemahaman dan hasil belajar siswa. Berikut dipaparkan hasil pengamatan yang dilakukan dari pelaksanaan tindakan pada setiap siklus sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan terhadap pemahaman siswa

Pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator yang meliputi: (1) keseriusan siswa, (2) inisiatif siswa, (3) partisipasi siswa dalam pembelajaran, (4) kemampuan siswa menyebutkan fakta, (5) kemampuan siswa menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri, (6) berdiskusi, (7) kemampuan siswa memahami perintah guru.

Tabel 4.1
Pengamatan Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran

No	Indikator	Hasil Observasi					
		Siklus I			Siklus II		
		B	C	K	B	C	K
1.	Keseriusan siswa	2 (6.25%)	6 (18.75%)	24 (75.00%)	27 (84.37%)	3 (9.37%)	2 (6.25%)
2.	Inisiatif bertanya	1 (3.12%)	11 (34.37%)	20 (62.50%)	29 (90.62%)	1 (3.12%)	2 (6.25%)
3.	Partisipasi siswa dalam pembelajaran	2 (6.25%)	2 (6.25%)	28 (87.50%)	28 (87.50%)	2 (6.25%)	2 (6.25%)
4.	Kemampuan siswa menyebutkan fakta	1 (3.12%)	5 (15.62%)	26 (81.25%)	27 (84.37%)	4 (12.50%)	1 (3.12%)
5.	Kemampuan siswa menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri	2 (6.25%)	3 (9.37%)	27 (84.37%)	29 (90.62%)	2 (6.25%)	1 (3.12%)
6.	Berdiskusi	1 (3.12%)	4 (12.50%)	27 (84.37%)	28 (87.50%)	3 (9.37%)	1 (3.12%)
7.	Kemampuan siswa memahami perintah guru	2 (6.25%)	3 (9.37%)	27 (84.37%)	29 (90.62%)	2 (6.25%)	1 (3.12%)

Sumber : Hasil pengamatan dan data diolah

Keterangan : B = baik C = cukup baik K = kurang baik

2. Hasil tes formatif hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran.

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada siswa dan telah dianalisis berdasarkan indikator pencapaian pemahaman materi benda dan sifatnya maka diperoleh data berikut :

Tabel 4.2
Hasil Tes Formatif Hasil Belajar Siswa Terhadap Materi Pembelajaran

No	Indikator	Mampu menjawab		Mengalami kesulitan	
		I	II	I	II
1.	Mampu mendeskripsikan hubungan demokrasi dan warga negara	1 (3.12%)	5 (15.62%)	6 (18.75%)	1 (3.12%)
2.	Mampu membedakan macam-macam demokrasi	2 (6.25%)	6 (18.75%)	6 (18.75%)	1 (3.12%)
3.	Mampu menjelaskan kegunaan demokrasi	1 (3.12%)	9 (28.12%)	5 (15.62%)	-
4.	Mampu menjelaskan keuntungan demokrasi pancasila	1 (3.12%)	6 (18.75%)	4 (12.50%)	-
5.	Mampu mendeskripsikan tujuan penggunaan demokrasi pancasila dalam masyarakat	2 (6.25%)	4 (12.50%)	4 (12.50%)	-
	Jumlah	7 (21.87%)	30 (93.75%)	25 (78.12%)	2 (6.25%)

Sumber data: hasil tes formatif siswa dan data diolah

3. Hasil penilaian berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa.

Berdasarkan angket yang telah diberikan dan diisi oleh siswa maka diperoleh data respon siswa terhadap pembelajaran sebagai berikut :

Tabel 4.3
Respon Siswa Terhadap Pembelajaran

No	Pertanyaan	Jawaban Siswa	
		Ya	Tidak
1	Siswa senang belajar dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru	30 (93.75%)	2 (6.25%)
2	Siswa merasakan kegunaan pembelajaran yang baru dilakukan dalam kehidupannya.	31 (96.87%)	1 (3.13%)
3	Siswa memerlukan metode pendekatan inkuiri seperti yang telah dilakukan.	29 (90.62%)	3 (9.38%)
4	Siswa merasa tertantang dengan langkah-langkah pembelajaran yang baru dilakukan.	30 (93.75%)	2 (6.25%)
5	Siswa tertarik dengan metode pembelajaran yang dikembangkan guru	31 (96.87%)	1 (3.13%)

Sumber data: hasil angket siswa dan data diolah

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan pada Siklus I dan Siklus II diolah dan dianalisis dengan hasil sebagai berikut :

- Dari data penilaian tentang pemahaman jelaslah bahwa implementasi pembelajaran berbasis inkuiri pada pokok bahasan Demokrasi memberikan kontribusi yang cukup signifikan (positif) terhadap peningkatan kreativitas siswa. Hal ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator keberhasilan terlihat pada tabel 4.1 yang menunjukkan pada siklus ke-1 terdiri atas indikator pertama baik 2 orang (6.25%), cukup 6 orang (18.75%), kurang 24 orang (75.00%). Indikator kedua terdiri atas baik 1 orang (3.12%), cukup 11 orang (34.37%), kurang 20 orang (62.50%). Indikator ketiga baik 2 orang (6.25%), cukup 2 orang (6.25%), kurang 28 orang (87.50%). Indikator keempat baik 1 orang (3.12%), cukup 5 orang (15.62%), kurang 26 orang (81.25%). Indikator kelima baik 2 orang (6.25%), cukup 3 orang (9.37%), kurang 27 orang (84.37%). Indikator keenam baik 1 orang (3.12%), cukup 4 orang (12.50%), kurang 27 orang (84.37%). Indikator ketujuh baik 2 orang (6.25%), cukup 3 orang (9.37%), kurang 27 orang (84.37%). Sedangkan pada siklus ke-2 dari 7 (tujuh) indikator keberhasilan terdapat indikator pertama baik 27 orang (84.37%), cukup 3 orang (9.37%), kurang 2 orang (6.25%). Indikator kedua baik 29 orang (90.62%), cukup 1 orang (3.12%), kurang 2 orang (6.25%). Indikator ketiga baik 28 orang (87.50%), cukup 2 orang (6.25%), kurang 2 orang (6.25%). Indikator keempat baik 27 orang (84.37%), cukup 4 orang (12.50%), kurang 1 orang (3.12%). Indikator kelima baik 29 orang (90.62%), cukup 2 orang (6.25%), kurang 1 orang (3.12%). Indikator keenam baik 28 orang (87.50%), cukup 3 orang (9.37%), kurang 1 orang (3.12%). Indikator ketujuh baik 29 orang (90.62%), cukup 2 orang (6.25%), kurang 1 orang (3.12%). Hal ini membuktikan terdapat

adanya peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran .

2. Dari data formatif I dan tes formatif II tampak terdapat peningkatan yang signifikan, hal ini tampak pada tabel 4.2 hasil formatif I rata-rata siswa yang mampu menjawab soal tes 7 orang (21.87%) dan mengalami kesulitan 25 orang (78.12%), sedangkan pada hasil tes formatif II yang mampu menjawab soal tes 30 orang (93.75%) dan yang mengalami kesulitan 2 orang (6.25%). Maka telah terjadi kenaikan sekitar 71.87% pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa implementasi metode inkuiri dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pemahaman pengetahuan siswa terhadap pembelajaran.
3. Berdasarkan tabel 4.3 data hasil angket yang diberikan kepada siswa didapatkan sebagian besar (93.75%) atau 30 orang siswa menyatakan senang belajar dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan hanya (6.25%) atau 2 orang siswa menyatakan tidak senang. Dalam aspek kegunaan pembelajaran yang baru dilakukan dalam kehidupannya sekitar (96.87%) atau 31 orang siswa mampu merasakan hal tersebut sedangkan (3.13%) atau 1 orang siswa belum dapat. Prosentase tersebut juga berlaku dalam aspek tentang perlu tidaknya metode pembelajaran itu digunakan sekitar (90.62%) atau 29 orang siswa sedangkan yang mengatakan tidak sebanyak (9.38%) atau 3 orang, padahal sebagian besar siswa merasa tertantang dengan langkah-langkah pembelajaran yang baru dilakukan, hal ini ditunjukkan oleh (93.75) atau 30 orang siswa dan (6.25%) atau 2 orang siswa merasa tidak ada tantangan. Bahkan siswa yang secara terbuka merasakan tertarik metode yang dikembangkan guru (96.87) atau 31 orang siswa dan hanya (3.13%) atau 1 orang siswa menyatakan tidak tertarik. Maka dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa metode inkuiri yang dikembangkan oleh guru (peneliti) secara garis besar dapat diterima oleh siswa.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi berbasis inkuiri dalam materi Demokrasi untuk

Tabel
Hasil Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran

No	Nama Siswa	Siswa senang belajar dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru		Siswa merasa kegunaan pembelajaran yang baru dilakukan dalam kehidupannya.		Siswa memerlukan metode pendekatan inkuiri seperti yang telah dilakukan		Siswa merasa tertantang dengan langkah pembelajaran yang baru dilakukan.		Siswa tertarik dengan metode pembelajaran yang dikembangkan guru	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	A	√		√		√		√		√	
2	AG	√		√		√		√		√	
3	BET	√		√		√		√		√	
4	DA	√		√		√		√		√	
5	FS	√		√		√		√		√	
6	FA	√		√		√		√		√	
7	FA	√		√		√		√		√	
8	FPY	√		√		√		√		√	
9	FR	√		√		√		√		√	
10	F	√		√		√		√		√	
11	FW	√		√		√		√		√	
12	HM	√		√		√		√		√	
13	HZ	√		√		√		√		√	
14	IP	√		√		√		√		√	
15	K	√		√		√		√		√	

16	L	√		√		√		√		√	
17	LM	√		√		√		√		√	
18	LL	√		√		√		√		√	
19	LA	√		√		√		√		√	
20	MKA	√		√		√		√		√	
21	MKA	√		√		√		√		√	
22	MA	√		√		√		√		√	
23	MNK	√		√		√		√		√	
24	MT	√		√		√		√		√	
25	NS	√		√		√		√		√	
26	PE	√		√		√		√		√	
27	PV		√	√		√		√		√	
28	RAW	√		√		√		√		√	
29	TDK		√	√		√		√		√	
30	UAM	√		√		√		√		√	
31	XN	√		√		√		√		√	
32	VS	√		√		√		√		√	
		30	2	31	1	29	3	30	2	31	1

siswa kelas VIIIF SMPN1 Sanggau dilakukan dalam 2 (dua) siklus dengan tanpa hambatan berarti.

2. Implementasikan pembelajaran berbasis inkuiri dalam materi Demokrasi di Indonesia dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas VIIIF SMPN1 Sanggau. Terbukti terdapat kenaikan persentase tingkat pemahaman dari siklus I sebesar 31.25% menjadi 93.75% pada siklus II, atau mengalami peningkatan sebesar 62.50 %.
3. Implementasikan pembelajaran berbasis inkuiri dalam materi Demokrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIIF SMPN 1 Sanggau.
4. Respon siswa terhadap implementasikan pembelajaran berbasis inkuiri dalam materi Demokrasi Di Indonesia untuk siswa kelas VIIIF SMPN1 Sanggau termasuk positif.

B. Saran-Saran

1. Guru dalam pembelajaran ini hendaknya lebih banyak strategi pembelajaran daripada sekedar memberikan informasi.
2. Siswa diberi kesempatan untuk menemukan dan menerapkan ide-idenya, dan guru sebaiknya sebagai fasilitator.
3. Kepala sekolah diharapkan mendukung dan memotivasi guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas .

DAFTAR PUSTAKA

- Dahar, Ratna Wilis, 2012, Teori-Teori Belajar, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, Jakarta.
- Degeng, S Nyoman, 2009, Taksonomi Variabel, IKIP Malang, Malang.
- Depdikbud, 2002, Pendekatan Kontekstual, Balai Pustaka, Jakarta
- Dimiyati Dkk, 2002, Belajar Dan Pembelajaran, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Haryanto, 2003, Sains Untuk SD Kelas VI, Erlangga, Jakarta
- Mulyasa, 2003, Kurikulum Berbasis Kompetensi, PT Rosda Karya, Bandung
- Puskur, 2003, KD Sains SD, <http://www.puskur.net/inc/sd/Pengetahuan Alam.pdf>.
- Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, www.depdiknas.go.id diupload Kamis tanggal 19 Maret 2015, pukul 16.20 WIB di STKIP Permata Ji. Pembangunan Kabupaten Sanggau
- Wahyudi, 2001, Tingkatan Pemahaman Siswa Pada Materi Pelajaran, Editorial Pendidikan Dan Kebudayaan Edisi 36, Depdiknas, Jakarta
- Gulo, W., 2004. Strategi Belajar Mengajar, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

PENDIDIKAN LITERASI SEKOLAH DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Oleh : Endang, S.Pd *)

Senin, 28 November 2016 yang lalu saya mengikuti pelatihan MGMP Perbatasan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Didalam kegiatan tersebut kami mendapatkan beberapa materi dan salah satunya materi tentang “Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah” dan kami diberi pemahaman tentang gerakan literasi dan strategi mewujudkan budaya literasi disekolah.

Setelah saya mempelajari dan memahami tentang literasi tersebut saya sangat setuju dan mendukung adanya literasi disekolah karena saya yakin kalau budaya literasi ini diterapkan disekolah maka minat baca peserta didik akan semakin meningkat dan sudah tentu pengetahuan mereka juga semakin bertambah dan ini akan memberikan dampak yang positif bagi guru dan siswa. Yang pastinya peran guru itu sangat penting untuk memulai dan mengintegrasikan literasi tersebut disekolah masing-masing khususnya di daerah perbatasan yang dianggap masih sangat ketinggalan dan terbelakang karena sumber daya manusia yang masih rendah, sering kali saya mendengar cerita dari teman-teman yang mengajar di daerah perbatasan masih banyak peserta didik yang mereka ajar belum bisa membaca dengan lancar, bahkan saya sendiri sering menemukan disekolah tempat saya mengajar masih ada beberapa siswa kelas 7 yang belum bisa membaca lancar masih terbata-bata dan kalau diminta untuk baca masih ada beberapa siswa yang menolak dan beralasan tidak bisa, sudah pasti keadaan seperti ini sangat memprihatinkan. Selain dari Sumber daya manusia yang masih rendah fasilitas juga masih sangat kurang dan sangat terbatas. Timbul dibenak saya beginilah potret anak perbatasan yang Sumber Daya Manusia nya masih terlalu jauh dari harapan, padahal daerah perbatasan adalah daerah garis depan yang jarak tempuhnya tidak jauh dari Malaysia dan bisa dijadikan sebagai contoh yang mampu mencerminkan sesuatu yang berkualitas, memiliki mutu yang baik supaya bisa bersaing dengan negara lain. adakah upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia khususnya yang ada di daerah perbatasan?

Pengalaman penulis saat pergi berlibur ke Malaysia (Juli Tahun 2014) yang lalu tepatnya di kota Sirian berkunjung tempat keluarga. Penulis melihat kondisi yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan Indonesia khususnya Sumber Daya Manusia, di negara Malaysia peserta didik anak kecil (SD) sudah lancar membaca dan sebagian besar sudah bisa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di negara kita khususnya daerah perbatasan untuk membaca saja belum lancar masih terbata-bata, apalagi untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari masih terlalu jauh dari harapan.

Dengan segala kekurangan yang dialami oleh sekolah yang ada diperbatasan maka muncul lah kontroversi dari beberapa guru yang tidak setuju dan enggan untuk dilaksanakan literasi disekolah mereka dengan beberapa alasan yang nyata yang terjadi disekolah, yaitu fasilitas buku yang dibaca tidak ada, yang ada hanya buku paket/buku pelajaran itu pun tidak mencukupi, sementara prinsip kegiatan literasi buku yang dibaca dianjurkan adalah buku non pelajaran misalnya picture book, fiksi (cerpen, novel, komik), non fiksi (cerita kehidupan sehari-hari, kisah sejarah, ilmiah populer, majalah, surat kabar, olah raga, seni dan motivasi) dan pilihan peserta didik sesuai minat dan kesenangannya, itu salah satu alasannya.

Adalagi yang mengatakan waktunya tidak memungkinkan untuk mengadakan literasi lima belas menit sebelum mata pelajaran karena banyak peserta didik yang tinggal jarak tempuhnya jauh dari sekolah, dimana mereka harus menempuh sekitar 1 jam dengan jalan kaki dan sampainya disekolah mereka sudah capek dan tidak ada minat lagi untuk membaca dan sementara pelajaran dimulai jam 7.30 WIB itu untuk pertimbangan bagi peserta didik yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah.

Itulah beberapa alasan mengapa beberapa sekolah masih ragu dan enggan melaksanakan gerakan literasi. Tapi disisi lain ada beberapa sekolah dan guru yang berpikiran bahwa literasi itu perlu dilaksanakan disekolah guna meningkatkan minat baca siswa yang bisa menghasilkan dampak positif bagi siswa dan guru.

Menurut hemat saya “beberapa alasan tadi bukanlah alasan yang tepat untuk tidak melaksanakan literasi disekolah, karena sebagaimana kita ketahui di Indonesia minat membaca itu sangat lah kurang bukan hanya di daerah perbatasan tapi diseluruh Indonesia”

- Menurut fakta literasi Indonesia ,
- (KOMPAS, 2009 Bangsa Indonesia dianggap tidak memiliki budaya membaca. Menurut OECD Budaya membaca masyarakat Indonesia menempati peringkat paling rendah diantara 52 negara di Asia Timur)
 - Berdasarkan statistik UNESCO pada 2012 indeks minat baca di Indonesia

baru mencapai 0,001%. Artinya dalam setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Semua negara mewajibkan siswanya untuk membaca sejumlah buku karya sastra, KECUALI INDONESIA. Siswa SMA Indonesia TIDAK WAJIB.

- Berdasarkan statistik UNESCO pada 2012 indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001%. Artinya dalam setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca.

Nah.....dengan melihat kenyataan yang

demikian sudah pasti itu sangat memprihatinkan. Selanjutnya apa upaya kita sebagai guru? Marilah kita sadar kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan minat baca melalui literasi. Masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut sudah pasti guru harus bersikap cerdas, kreatif, berusaha keras dan harus berperan aktif sebagai pemula, jadikan lah itu sebagai tantangan bagi kita karena zaman akan semakin berkembang kalau guru sudah beraniamulai maka siswa nanti akan mengikuti secara perlahan-lahan dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan.

Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah yang dialami oleh sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan waktu supaya gerakan literasi tetap bisa diadakan disekolah. Misalnya, sekolah tersebut fasilitasnya tidak memadai/ buku bacaannya tidak ada hanya buku pelajaran.

Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh sekolah misalnya melibatkan publik/masyarakat (komite sekolah, orang tua, alumni, dunia usaha/program CSR) sekolah bisa minta bantuan. Dan sementara fasilitas belum ada dan masih diusahakan sambil berjalan disitulah seorang guru harus berperan, guru harus kreatif, misalnya guru menyediakan sumber bacaan dari potongan berita dikoran atau majalah bekas dibawa kesekolah untuk dibaca oleh siswa atau dengan cara lain guru bisa meminta siswa membawakan buku cerita dari rumah bagi siswa yang punya buku dan guru bisa menerapkan metode membaca nyaring biar semua bisa mendengar dan kemudian bisa didiskusikan.

Dan masalah yang kedua, masalah waktu yang tidak memungkinkan untuk mengadakan literasi disekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dikarenakan pertimbangan banyak peserta didik yang bertempat tinggal jauh dari sekolah. Keadaan yang seperti ini bisa kita atasi dengan mengadakan literasi/ membaca lima belas menit secara fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kapasitas, kondisi, dan budaya lokal sekolah.

Dengan adanya solusi diatas tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan literasi disekolah yang sudah dianjurkan oleh Dinas Pendidikan. Saya sebagai guru bahasa Inggris yang mengajar di daerah perbatasan sangat setuju dan mendukung adanya literasi disekolah, oleh sebab itu mari kita para guru memulai menerapkan literasi disekolah kita sehingga pendidikan karakter berbasis budaya sekolah dapat kita terapkan disekolah kita masing-masing khususnya di daerah perbatasan. Tanpa upaya dan peran dari guru maka gerakan literasi tidak bisa terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini diharapkan pemerintah juga harus mendukung khususnya Dinas Pendidikan misalnya, melaksanakan pelatihan-pelatihan yang materinya harus diselipkan tentang literasi seperti pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Sintang pada Tgl 28-29 November 2016 yang lalu untuk guru perbatasan. Pelatihan tersebut sangat bermanfaat khususnya bagi saya yang mengikutinya, dan akan saya terapkan disekolah. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Sintang yang sudah mewadahi dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan. Dengan adanya pelatihan guru-guru yang ada diperbatasan, yang masih belum paham akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman tentang gerakan literasi disekolah sehingga tiap sekolah dan guru-guru yang ada diperbatasan tidak ragu untuk melaksanakan literasi di sekolah masing-masing untuk meningkatkan mutu dan minat baca peserta didik.

Dengan melakukan upaya-upaya diatas itu artinya kita dewan guru sudah menumbuhkembangkan budaya sekolah dan mendukung terbentuknya Branding disekolah masing-masing. Dan ini akan membawa dampak yang positif terhadap sekolah, guru dan juga peserta didik.

*) Penulis adalah Guru pada SMP Negeri 2 Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang.



CARUT MARUT TUNJANGAN KHUSUS DI WILAYAH PERBATASAN

Oleh : Dwi Handayani, S.Pd *)

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bertolak dari pandangan hidup tersebut, sehingga Pancasila sudah mendarah daging didalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Mengingat kembali tahun 1991 ketika memasuki Sekolah Dasar (SD) ketika pembina upacara membacakan Teks Pancasila, satu hal yang membuat saya bertanya-tanya, apakah arti Pancasila yang baru dibacakan oleh bapak guru tadi, termasuk arti sila pertama sampai sila kelima. Memasuki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 1997 Pancasila pun tetap dibacakan dan tetap menjadi suatu bagian yang sangat penting dari rangkaian upacara bendera setiap hari senin. Memasuki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai ke Perguruan Tinggi, bahkan sampai hari ini Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa yang menduduki kedudukan yang sangat tinggi. Semenjak Pancasila dirumuskan sampai saat ini Pancasila tetap diagungkan, barang siapa yang ingin mengubah atau melecehkan Pancasila tentu akan berhadapan dengan hukum.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam kelima sila Pancasila yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa kita segenap bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta selain itu adanya pengakuan dan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak adanya paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antar umat beragama. Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya.

Adapun sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia mempunyai makna bersama-sama membangun rasa persatuan dan nasionalisme dalam keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung arti dalam suatu pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan adanya semangat gotong-royong. Sila terakhir dalam Pancasila yaitu sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki arti tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahiriah maupun batiniah.

Walaupun masing-masing sila berdiri sendiri, kelima sila tersebut saling bersinergis satu sama lain. Pancasila sebagai Ideologi Negara yang sempurna ternyata belum dapat diimplementasikan dengan baik sehingga banyak terjadi permasalahan yang menyangkut Negeri ini terutama pada sila kelima. Hal ini yang membuat rasa penasaran saya bagaimana seharusnya penerapan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang suku, agama, dan ras.

Keadilan sebenarnya berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain (Rukiyati, dkk 2008). Seorang dapat bertindak adil apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Menurut Notonegoro (1980) hakekat daripada adil yaitu dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antar satu dengan yang lain adalah wajib. Dewasa ini banyak sekali permasalahan yang menyangkut keadilan sosial. Permasalahan ten-

tang keadilan ini memenuhi berbagai media masa baik media cetak maupun media elektronik. Masyarakat dengan mudah mengakses berbagai berita yang membahas permasalahan dalam kehidupan manusia.

Didalam bidang pendidikan nilai keadilan sangat diperlukan karena hal ini berpengaruh pada pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Setiap sekolah seharusnya bisa mendapatkan sarana dan prasarana atau hal apapun yang menunjang kegiatan di sekolah secara adil. Permasalahan yang berkembang saat ini di daerah yaitu masalah pemberian Tunjangan daerah Khusus atau daerah terpencil. Pemberian tunjangan ini sudah mulai meluas tidak hanya di desa yang jauh dari pusat kota kecamatan tetapi banyak desa yang berdekatan dengan pusat kota kecamatan juga mendapatkan tunjangan tersebut. Hal ini menimbulkan banyak pendapat atau menjadi perbincangan hangat dilingkungan masyarakat. Ini disebabkan karena ketidakjelasan atau ketidaktauan guru secara khusus dan masyarakat secara umum mengenai kriteria atau syarat seseorang bisa atau layak mendapatkan tunjangan khusus tersebut.

Tunjangan Terpencil pada dasarnya merupakan tunjangan yang diperuntukan bagi guru-guru yang mengajar di daerah terpencil. Berbicara tentang Tunjangan terpencil seolah-olah mengingatkan kami akan nasib buruk yang sebagian guru alami, berbicara tentang terpencil juga mengingatkan kami betapa TIDAK ADIL nya dan betapa Tidak jelas nya Sistem pemberian Tunjangan terpencil itu. Tunjangan terpencil bagi sebagian guru merupakan tunjangan yang sangat Misterius, tidak tahu kapan dia akan datang kepada si penerima keuntungan, ibarat kata istilah "datang tak diundang, pergi tak diantar". Berbahagialah bagi mereka yang menerima tunjangan Terpencil tetapi "Derita Loe " bagi guru yang tidak menerima tunjangan terpencil, dan sampai detik ini pun banyak guru yang tidak tahu APA dan SIAPA YANG SALAH sehingga ada yang tidak mendapatkan tunjangan itu. Memang sebenarnya tunjangan tersebut bukan satu-satunya pendapatan yang diterima oleh guru, tetapi kami rasa semua orang tidak ada yang menolak jika mendapatkan rejeki yang kami anggap cukup besar angkanya. Berbicara masalah ekonomi, gaji, upah atau pendapatan lain dapat memicu semangat kerja seseorang dan seharusnya semakin meningkatkan kualitas dalam bekerja.

Informasi tentang tunjangan terpencil di daerah kami memang sudah lama kami dengar. Kami tidak berharap banyak tentang tunjangan itu, karena kami berpikir tunjangan itu tidak mungkin kami terima sebab sekolah kami masih berada di Pusat Kota kecamatan. Meskipun kami Pesimis akan tunjangan itu sedikit banyak tetap berharap sekolah kami masuk daerah terpencil, bahkan kami Dewan Guru di sekolah sempat memiliki cita-cita tersendiri seandainya tunjangan itu ada.

Bagi para guru yang tidak mendapatkan tunjangan, mengharapkan Tunjangan terpencil ibarat pungguk merindukan bulan, sesuatu yang mustahil terjadi. Tetapi tetap punya mimpi tunjangan itu bisa saja terjadi karena katanya di DAPODIK sekolah kami masuk di peta daerah terpencil. Seiring berjalannya waktu ternyata kabar tentang beberapa Sekolah yang dekat dengan pusat kecamatan akan mendapat tunjangan terpencil pun menjadi kenyataan. Memasuki bulan Juli 2016, beberapa guru yang sekolahnya berada dipusat kecamatan dipanggil ke kabupaten entah tidak tahu ada urusan apa atau ada kegiatan apa dipanggil ke kabupaten tanpa ada memberikan informasi atau pemberitahuan kepada guru yang namanya tidak ikut dipanggil ke kabupaten. Seolah ini dilakukan secara diam-diam. Setelah beberapa waktu berjalan baru terdengar kabar bahwa yang namanya dipanggil ke kabupaten ternyata mendapatkan tunjangan daerah khusus, beda hal nya dengan guru yang namanya tidak dipanggil ke kabupaten walaupun mereka sama-sama berasal dari sekolah yang sama dan bahkan



Foto : Tribunnews.com

masa kerja golongannya ada yang lebih lama. Dari semua kriteria atau syarat untuk mendapatkan tunjangan itu, ternyata banyak guru yang tidak mendapatkan tunjangan memang sudah ada yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan terpencil. Ada disuatu sekolah ada guru yang mendapat tunjangan terpencil Masa Kerjanya lebih rendah daripada guru yang tidak mendapat tunjangan terpencil. Melihat realita yang ada sebagai pihak yang merasa dirugikan pun tidak tinggal diam. Banyak yang mulai mencari informasi kesemua sekolah yang dianggap mungkin sekolah di daerah terpencil siapa saja guru-guru yang tidak mendapatkan tunjangan itu dan mencoba menebak apa yang menjadi permasalahannya. Hanya satu jawaban yang didapatkan TIDAK TAHU dan SABAR mungkin tahun depan. Bahkan ada banyak permasalahan yang lebih aneh lagi ada satu sekolah di Kota dapat Tunjangan tetapi di tahun yang sama sekolah dikampung yang biasa dapat dan akhirnya tidak dapat tunjangan dan setelah di urus oleh siapa dan kemana akhirnya sekolah tersebut dapat tunjangan. Ini sangat lucu dan memunculkan pertanyaan Siapa atau pihak mana yang berhak menentukan tunjangan terpencil ini. Sebenarnya ada banyak perihal yang ingin kami ungkapkan tetapi keterbatasan dan etika menulis yang membatasi kami untuk bersuara. Sampai hari ini dari sekian banyak guru yang mengajukan untuk mendapatkan tunjangan terpencil susulan, ada dua orang yang berhasil, tetapi tidak dengan guru yang lain.

Hal ini lah yang menurut kami menyebabkan ketidakjelasan masalah pemberian Tunjangan daerah khusus atau daerah terpencil. Muncul kecurigaan dimana-mana, informasi atau berita tidak jelas beredar dikalangan para guru dan masyarakat. Semua mulai bertanya-tanya dan mencoba mengeluarkan pendapat masing-masing yang tidak tahu pasti kebenarannya. Oleh karenanya, masalah ini semakin meruncing dan menimbulkan perselisihan atau hubungan yang tidak baik antara guru yang mendapat tunjangan dengan guru yang tidak mendapatkan tunjangan. Proses belajar mengajar menjadi terganggu karena tidak ada lagi keharmonisan hubungan antara guru disekolah yang sama karena ada guru yang mendapatkan tunjangan dan ada guru yang tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Semua menjadi semakin tidak jelas sebenarnya siapa yang bersalah dalam hal ini, guru yang bersangkutan, operator sekolah, kepala sekolah, ataukah ada pihak-pihak yang lain yang patut disalahkan.

Bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan tersebut ada seba-

gian sudah mulai sedikit demi sedikit menurunkan kualitas mengajarnya, menjadi malas dan acuh tak acuh terhadap urusan sekolah, ini merupakan akibat rasa ketidakadilan. Rasa iri sesama guru bermunculan, mulai membandingkan kualitas mengajarmencari siapa yang layak atau tidak layak mendapatkan tunjangan tersebut. Mungkin hal ini seperti dua sisi mata uang yang berbeda, ada yang merasa beruntung dan ada yang merasa dirugikan.

Banyak guru nantinya yang berada jauh di daerah hulu mulai mencari cara supaya dapat pindah mengajar di sekolah yang berada dipusat kota, karena ada beberapa sekolah yang berada di dekat pusat kota kecamatan sekarang ini mendapatkan tunjangan daerah khusus. Hal ini bisa menimbulkan masalah baru siapa nantinya yang mengajar di daerah hulu yang jauh jika guru di daerah hulu sudah mulai melirik sekolah yang berada di dekat kota kecamatan. Harapannya semoga masalah ini segera mendapat kejelasan atau titik terang supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan semakin meruncing. Adanya pemerataan guru yang mendapatkan tunjangan di sekolah yang sama supaya tidak menimbulkan masalah intern di dalam sekolah., karena hal ini bisa berakibat buruk bagi siswa dan sekolah. Diharapkan juga supaya sistem penerimaan tunjangan daerah khusus lebih diperjelas dan lebih baik lagi supaya tidak ada saling curiga di dalam lingkungan sekolah. Berbicara masalah uang atau pendapatan itu adalah sesuatu yang sensitif, kalau kita lihat di surat kabar atau pun televisi gara-gara yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak orang bahkan rela melakukan tindakan yang kurang baik. Oleh karena itu besar harapan kami supaya pembagian tunjangan daerah khusus atau daerah terpencil bisa dilakukan dengan jelas dan lebih baik lagi. Supaya sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan atau dikesampingkan. Yang menjadi harapan pemerintah tentunya bagi guru yang sudah mendapatkan berbagai tunjangan supaya bisa lebih meningkatkan kualitas lagi dalam proses belajar mengajar. Sehingga kualitas penduduk Indonesia di bidang pendidikan bisa lebih meningkat, karena hal ini merupakan salah satu indikator penentu suatu negara menjadi negara berkembang atau sudah menjadi negara maju. Semogaharapanmenjadikenyataanbagi kami daerah 3 T, di wilayahrepubliktercintai.

**) Penulis adalah Guru pada SMP Negeri 5 KayanHulu, Kabupaten Sintang*

PERMAINAN MONOPOLI SPOK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PERCAKAPAN SISWA KELAS VI SDN NO. 09 SANGGAU KABUPATEN SANGGAU

OLEH : TITIS KARTIKAWATI, S. Pd. SD

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengajar pada hakekatnya bermaksud mengantarkan siswa untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam praktik perilaku mengajar yang ditunjukkan oleh guru beraneka ragam, meskipun sama keanekaragaman perilaku guru mengajar bila ditelusuri akan memperoleh gambaran tentang pola umum interaksi antara guru dan siswa. Dalam proses belajar mengajar, tujuan pokoknya adalah untuk merubah tingkah laku atau sikap siswa. Maka yang menjadi subjek didik adalah siswa. Bagaimana siswa agar dapat belajar dengan baik dan bersemangat, itu semua sangat ditentukan oleh peranan guru. Guru harus bisa memilih cara yang paling baik untuk membangkitkan semangat belajar siswa agar mereka dapat menerima, memahami dan mengerti akan bahan pelajaran yang diajarkan.

Kemampuan menulis siswa kita sangat lemah, ini berdasarkan riset dan Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2012. Dibandingkan semua Negara anggota, kualitas kemampuan menulis siswa menempati urutan ke 65 dari 66 anggota PISA. Kemampuan menulis seseorang diperoleh dari kebiasaan orang itu menulis. Menulis dapat dilakukan dengan mudah dan sederhana, berupa: menuliskan curahan hati, menuliskan gagasan atau ide, menuliskan pengalaman dalam bentuk diary, walaupun aktifitas menulis itu sederhana namun sangat umum jika anak-anak sekolah merasa sangat kesulitan membuat tulisan dengan baik.

Dalam pembelajaran, menulis dapat dijadikan metode untuk melatih siswa belajar yang baik. Bagaimana strategi menulis dalam pembelajaran menggunakan pendekatan Scientific? menulis imajinatif dalam proses pembelajaran adalah bagaimana mengasosiasikan dan mengkomunikasikan proses-proses belajar dalam bentuk karya cerita, baik dalam bentuk cerita pendek, atau cerita bergambar, drama maupun parafrase.

Selama ini ketika siswa diberi tugas membuat dialog/percakapan, siswa merasa kesulitan dalam membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Tata kalimat yang digunakan sering terbalik dan penggunaan bahasa yang tidak baku. Siswa belum mampu menentukan unsur-unsur dalam kalimat. Dari jumlah siswa 20 orang, hanya 10 orang yang mampu membuat percakapan sederhana dengan menggunakan unsur-unsur kalimat yang benar. Oleh karena itu penulis berusaha merancang pembelajaran yang menyenangkan pada kompetensi dasar Menyusun percakapan tentang berbagai topik dengan memperhatikan penggunaan ejaan. Penulis membuat permainan yang diberi nama "Monopoli SPOK" yang bertujuan agar mampu menyusun kalimat yang mengandung unsur-unsur SPOK pada percakapan yang siswa buat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun percakapan sederhana dengan memperhatikan unsur-unsur SPOK dalam kalimat yang benar?
2. Bagaimana dampak permainan "Monopoli SPOK" pada kegiatan pembelajaran menulis percakapan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam menyusun percakapan sederhana dengan memperhatikan unsur-unsur

SPOK dalam kalimat yang benar.

3. Untuk mengetahui dampak permainan "Monopoli SPOK" pada kegiatan pembelajaran menulis percakapan.

D. Manfaat Penulisan

Setelah Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kemampuan menulis percakapan dengan memperhatikan unsur-unsur SPOK.
2. Bagi guru yaitu melalui permainan Monopoli SPOK ini, guru menjelaskan unsur-unsur kalimat dengan menyenangkan sehingga minat dan aktifitas belajar siswa meningkat.
3. Bagi sekolah yaitu melalui penulisan karya ini, hasil belajar Bahasa Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu, hasil penulisan karya ini akan memberikan sumbangan yang baik pada sekolah dalam rangka memperbaiki hasil belajarnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Menulis

Hakekat menulis

Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan tulisannya serta menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan lainnya (Suparno dan Yunus, 2004: 26).

Seseorang dengan menulis dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Tarigan (1982:21) mengatakan bahwa menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut, kalau mereka memahami bahasa dan gambaran tersebut. Senada dengan Tarigan, Nurudin (2007:4) menyebutkan bahwa menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Definisi menulis ini mengungkapkan bahwa menulis yang baik adalah menulis yang bisa dipahami oleh orang lain, sedangkan Wiyanto (2004:1-2) menyebutkan bahwa menulis mempunyai dua arti. Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang dirubah itu bunyi bahasa (bunyi yang berasal dari alat ucap manusia). Kedua, kata menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Gagasan yang telah ditulis kemudian ditampung oleh pembaca dengan cara membaca.

Menulis dapat dianggap sebagai proses ataupun suatu hasil. Dilihat dari segi prosesnya, menulis dapat dimulai dari menggerakkan pensil di kertas sampai terwujudnya karangan juga dapat dimulai dari memilih buku yang akan dibaca, mencatat bagian-bagian yang diperlukan kemudian digunakan untuk bahan yang dibicarakan dalam karangan. Pada diri siswa, keterampilan menulis dibangun guru melalui banyak latihan dengan menggunakan teknik atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Beberapa teknik pembelajaran yang dapat digunakan guru, misalnya menulis secara langsung tanpa memedulkan teori, memulai menulis dari bagian yang paling disukai siswa, menulis nonlinear atau menulis yang didasari dengan kegembiraan membaca. Pembe-

ajaran menulis dilaksanakan dalam jam pelajaran dan diluar jam pelajaran. Beberapa Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis di kelas adalah bermain-main dengan bahasa dan tulisan, kuis, membuat atau mengganti akhir cerita, dan menulis meniru model. Diluar jam pelajaran, guru dapat menggunakan strategi menulis buku harian, menyelenggarakan majalah dinding atau kliping, yang semuanya diarahkan agar siswa senang menulis.

B. Monopoli

Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Setiap pemain melemparkan dadu secara bergiliran untuk memindahkan bidaknya, dan apabila ia mendarat di petak yang belum dimiliki oleh pemain lain, ia dapat membeli petak itu sesuai harga yang tertera. Bila petak itu sudah dibeli pemain lain, ia harus membayar pemain itu uang sewa yang jumlahnya juga sudah ditetapkan.

Sejarah sebelum Monopoli sudah ada permainan-permainan yang serupa, di antaranya adalah *The Landlord's Game* yang diciptakan oleh Elizabeth Magie untuk mempermudah orang mengerti bagaimana tuan-tuan tanah memperkaya dirinya dan mempermudah para penyewa. Magie memperkenalkan permainan ini pada tahun 1904. Walaupun permainan ini dipatenkan, tidak ada produsen yang memproduksinya secara luas sampai tahun 1910 oleh *The Economic Game Company* di New York. Di Britania Raya permainan ini diterbitkan pada tahun 1913 oleh *The Newbie Game Company* di London dengan nama *Brer Fox an' Brer Rabbit*. Selain melalui penjualan, permainan ini juga tersebar dari mulut ke mulut dan variasi-variasional juga mulai berkembang. Salah satunya adalah yang disebut *Auction Monopoly* atau kemudian disingkat menjadi *Monopoly*. Permainan ini kemudian dipelajari oleh Charles Darrow dan dipatenkan dan dijual olehnya kepada Parker Brothers sebagai penemuannya sendiri. Parker mulai memproduksi permainan ini secara luas pada tanggal 5 November [[1935].

Monopoli SPOK

A. Pengertian Monopoli SPOK :

Monopoli SPOK adalah permainan yang dibuat untuk melatih keterampilan siswa dalam menyusun kalimat. Kalimat yang baik harus mengandung unsur-unsur Subjek, Predikat, Objek dan Keterangan (SPOK). Konsep permainannya adalah mengumpulkan poin berupa uang mainan. Bagi pemain yang dapat mengumpulkan uang terbanyak maka dialah pemenangnya.

B. Tujuan permainan

Permainan monopoli SPOK ini bertujuan untuk :

1. Melatih siswa membuat kalimat sesuai unsur-unsur SPOK
2. Melatih siswa menentukan unsur-unsur SPOK dalam kalimat.
3. Melatih siswa membuat percakapan sederhana.
4. Melatih kerjasama siswa.
5. Melatih Percaya diri dan keaktifan siswa.

C. Alat-alat yang digunakan dalam permainan Monopoli SPOK

1. Karpet
2. Dadu
3. Kartu kata
4. Display monopoli
5. Uang mainan

D. Cara bermain monopoli SPOK

1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok.
2. Masing-masing kelompok menunjuk 1 orang untuk mewakili permainan.
3. Pemain yang ditunjuk harus melaksanakan permainan sesuai petunjuk sampai selesai.
4. Anggota kelompok yang lain membantu kawannya untuk menjawab pertanyaan.
5. Jika pemain dapat menjawab pertanyaan dengan benar, ke-

lompok tersebut mendapatkan bonus uang mainan.

6. Kelompok yang dapat mengumpulkan bonus uang mainan maka kelompok tersebut yang dinyatakan menang.
7. Setiap kelompok diberi kesempatan menjawab dalam waktu 10 detik.

E. Petunjuk melakukan permainan

1. Pemain melempar dadu, kemudian melangkah sesuai jumlah mata dadu yang keluar.
2. Pemain membuat kalimat /menentukan SPOK dalam kalimat dalam hitungan 9-10 detik.
3. Jika siswa berhasil membuat kalimat dengan tepat dan dapat menyebutkan lengkap SPOK nya, maka mendapat uang Rp. 20.000,-. Jika pemain hanya mampu menyebutkan SPO maka mendapat Rp. 15.000,-.
4. Jika pemain tidak dapat menjawab pertanyaan sesuai waktu yang diberikan maka pemain akan mendapat denda.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan hasil belajar menulis percakapan menggunakan metode penugasan diketahui bahwa terdapat peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar secara signifikan, dari 50% (belum berhasil) menjadi 100% (berhasil). Data ini diperoleh ketika guru memberikan penilaian tes tertulis di akhir pembelajaran. Siswa dapat membuat percakapan sederhana sebanyak minimal 4 baris. Sebagian besar siswa dapat membuat 4 baris percakapan bahkan ada 6 siswa yang dapat membuat percakapan lebih dari 4 baris. Percakapan yang dibuat menggunakan unsur-unsur SPOK dalam kalimat. Motivasi siswa dalam pembelajaran meningkat dengan ditunjukkan keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan dan merangkum pembelajaran.

Permainan monopoli SPOK dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mempelajari unsur-unsur SPOK dalam kalimat. Semua kelompok mendapat skor 3 dalam hal keaktifan. Ada 2 kelompok yang kemampuan menyampaikan pendapat mendapat skor 2.

B. Pembahasan

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di SDN No. 09 Sanggau, kelas VI berjumlah 20 orang. Mata pelajaran yang diambil adalah Bahasa Indonesia kelas VI semester 1. Alokasi waktu yang digunakan adalah satu kali pertemuan (2 x 35 menit). Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat menyusun kalimat unsur-unsur SPOK dengan benar. Melalui permainan monopoli SPOK, siswa dapat menemukan unsur-unsur SPOK dalam kalimat dengan tepat, melalui permainan monopoli SPOK, siswa dapat membuat percakapan sederhana dengan tepat. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan Scientific, model pembelajaran *Cooperative learning* dan menggunakan metode tanya jawab, permainan dan penugasan.

a. Perencanaan

Langkah-langkah Kegiatan

1. Kegiatan Awal

- a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca doa.
- b. Guru mengecek kehadiran siswa.
- c. Apersepsi (guru bertanya jawab tentang materi tata kalimat dan guru mengajak siswa bernyanyi "Belajar SPOK" untuk menghubungkan materi yang akan dipelajari).
- d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, desain pembelajaran dan bentuk penilaian yang akan dilaksanakan.

2. Kegiatan Inti

- a. Eksplorasi
 1. Guru menayangkan materi tata kalimat melalui LCD.
 2. Siswa mengamati tayangan materi yang disajikan guru.
 3. Melalui tanya jawab siswa menentukan unsur-unsur SPOK dalam kalimat.
- b. Elaborasi



1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok untuk bermain monopoli SPOK.
2. Guru memberi petunjuk cara melakukan permainan monopoli SPOK.
3. Siswa bermain monopoli SPOK.
4. Guru membimbing siswa dalam melakukan permainan.
- c. Konfirmasi
 1. Guru memberikan tanggapan tentang jalannya permainan Monopoli SPOK.
 2. Guru memberikan kesempatan bertanya bagi siswa yang belum mengerti tentang materi yang diberikan.
 3. Jika ada siswa yang belum mengerti, guru menjelaskan kembali secara singkat tentang unsur-unsur kalimat.
 4. Guru memberi bimbingan dan motivasi bagi siswa yang belum dapat menyusun kalimat sesuai unsur-unsur SPOK dengan benar.
 5. Memberi penghargaan bagi siswa yang dapat membuat kalimat sesuai unsur-unsur SPOK dengan benar.
3. Kegiatan Akhir
 - a. Siswa bersama guru merangkum materi pelajaran.
 - b. Evaluasi membuat percakapan sederhana
 - c. Tindak lanjut
 - d. Penutup

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh guru. Siswa melakukan permainan monopoli dengan baik dan antusias. Siswa berusaha menyusun kalimat sesuai dengan petunjuk permainan.

c. Penilaian

Penilaian dalam pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan prosedur penilaian proses dan penilaian akhir. Bentuk penilaiannya adalah permainan dan tes tertulis. Penilaian permainan dalam bentuk rubrik dan tes tertulis pembuatan percakapan sederhana dalam bentuk skor angka.

dilaksanakan dengan menggunakan permainan Monopoli SPOK dalam pembelajaran bahasa Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Permainan "Monopoli SPOK" dalam pembelajaran bahasa Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan pada keterampilan siswa kelas VI SDN No. 09 Sanggau dalam menyusun percakapan dengan memasukkan unsur-unsur SPOK dalam kalimat. Siswa mampu menemukan unsur-unsur SPOK dalam kalimat. Hal tersebut ditandai dengan adanya 20 siswa yang mendapat nilai di atas KKM Mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 75.
2. Dampak penggunaan Monopoli SPOK pada pembelajaran Bahasa Indonesia adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat hal ini ditandai dengan adanya antusias siswa dalam bertanya, melakukan permainan sesuai petunjuk dan mampu menyimpulkan materi yang telah diberikan.

B. Saran

1. Untuk menghasilkan pembelajaran yang baik maka hendaknya guru selalu membuat perencanaan dan mempersiapkan media yang tepat sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa.
2. Guru dituntut untuk selalu berkreasi dan inovatif baik dalam model pembelajaran maupun membuat media pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang keaktifan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail. 2003. Model Pembelajaran Kooperatif. Dit. PLP Dikdasmen.
- Rusman. 2011. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences (2015), Jakarta: Prenadamedia group
- Puji, Santosa, dkk, 2008. Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, Jakarta, Universitas Terbuka

**) Penulis adalah Guru Sekolah Dasar Nomor 09 Sanggau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau*

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia yang telah

GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG

Oleh : Perorusdi, S.Pd *)

Daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia menjadi daerah yang paling terbelakang dalam hal pendidikan dan kesejahteraan guru. Kenyataan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi karena sesuai dengan pasal 34 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya, baik anak-anak di daerah perkotaan maupun anak-anak di daerah perbatasan mempunyai hak yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki hak, warga negara juga mempunyai kewajiban, salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk membela kedaulatan negara. Namun, ketika pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak warga negara, warga negara tersebut juga cenderung untuk mengabaikan kewajibannya. Contohnya adalah yang terjadi masyarakat yang berdomisili di sepanjang perbatasan dan Masyarakat diwilayah perbatasan yang lebih menguasai bahasa negara tetangga ketimbang bahasa Indonesia serta lebih mengenal mata uang negara tetangga ketimbang Rupiah, demikian juga halnya dengan produk yang terkesan lebih mencintai produk luar ketimbang produk dalam negeri. Mereka lebih berinteraksi dan berorientasi kepada desa terdekat negara tetangga. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Inilah dampak buruk yang terjadi apabila pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan diabaikan, karena akan mengikis rasa nasionalisme yang bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa.

Perbatasan cukup memprihatinkan jika kita melihat pendidikan atau sumber daya manusianya yang dengan segala keterbatasan serta keterbelakangan diberbagai aspek kehidupan jika dibanding masyarakat diperkotaan dan hal ini memicu juga lemahnya rasa nasionalisme masyarakat diwilayah tersebut sehingga tidak sedikit dari warga masyarakat perbatasan yang usia produktif atau usia sekolah harus putus sekolah serta pergi merantau ke negara tetangga untuk mengadu nasib dan tidak sedikit pula yang memiliki dwikewarganegaraan atau bahkan tidak pernah mengurus data kependudukan di Tanah airnya sendiri sehingga memilih untuk menjadi warga negara tetangga.

Gerakan Literasi Sekolah dicanangkan oleh Pemerintah untuk memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan komponen literasi informasi sebagai berikut:

1. Literasi Dasar (*Basic Literacy*), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
2. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan Literasi Perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan

bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan,

atau mengatasi masalah.

3. Literasi Media (*Media Literacy*), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Secara gamblang saat ini bisa dilihat di masyarakat kita bahwa media lebih sebagai hiburan semata. Kita belum terlalu jauh memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan informasi tentang pengetahuan dan memberikan persepsi.
4. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (*Computer Literacy*) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta menjalankan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.
5. Literasi Visual (*Visual Literacy*), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang setiap hari membanjiri kita, baik dalam bentuk tercetak, di televisi maupun internet, haruslah terkelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

Namun dibeberapa sekolah di daerah Perbatasan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dengan melihat penjabaran komponen-komponen literasi tersebut justru menambah masalah baru selain masalah yang selama ini dihadapi yaitu dengan minimnya sarana serta fasilitas belajar, hal ini terjadi karena program ini wajib dilakukan disemua sekolah di Kabupaten Sintang tanpa memberikan pertimbangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisikbud) Kabupaten Sintang, Marchues Afen mengatakan setiap sekolah di satuan pendidikan sederajat baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) wajib menerapkan gerakan literasi.

"Jadi setiap sekolah mewajibkan siswanya membaca selama 15 menit sebelum jam pelajaran di mulai," Demikian tegas beliau. (<http://pontianak.tribunnews.com/2016/07/18>)

Ada beberapa diantaranya kendala yang harus dihadapi oleh beber-





apa sekolah di wilayah perbatasan, diantaranya, sekolah tidak memiliki ruang perpustakaan, tidak tersedianya buku-buku referensi atau buku bacaan dan lebih parahnya lagi kondisi infrastruktur jalan yang harus dilalui siswa untuk mencapai sekolah dan letak gedung sekolah yang jauh dari perkampungan. Berdasarkan data siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ketungau Tengah sebagai salah satu sekolah yang berada di wilayah perbatasan, dari 244 jumlah siswa, hanya berkisar 28 siswa (11,50%) yang tempat tinggalnya berjarak kurang dari atau sama dengan 2 KM dari sekolah, sementara sisanya harus menempuh perjalanan 3 – 9 KM dengan waktu tempuh 1 jam sampai 3 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, bagi sekolah-sekolah perbatasan seperti Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ketungau Tengah, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan program yang hanya menjadi rencana semata yang terlaksananya entah kapan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ketungau Tengah dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) dimulai pada pukul 07.30 WIB dihari Senin sampai Kamis, sementara pada hari Jumat dan Sabtu dimulai pada pukul 07.00 WIB karena pada hari Jumat dan Sabtu siswa melakukan senam bersama dewan guru serta pada hari Jumat dan Selasa setiap pukul 14.00 – 16.00 WIB siswa harus mengikuti pengembangan diri (Kepramukaan dan Olahraga). Hal ini dilakukan mengingat kurang lebih 88,50% siswanya menempuh perjalanan yang lebih dari 1 jam dengan berjalan kaki sehingga siswa harus berangkat ke sekolah dalam rentang waktu dari pukul 04.00 WIB sampai 06.00 WIB, jika siswa berangkat diatas jam tersebut maka siswa akan terlambat sampai di sekolah dan ini akan lebih parah saat musim hujan, dimana jika terjadi banjir maka siswa yang hadir di sekolah hanya paling banyak 10 – 15% saja, ini terjadi karena jalan yang dilalui oleh siswa untuk mencapai sekolah melewati sungai berbatu yang berarus deras dan tidak mampu diseberangi meskipun banjir hanya terjadi 1 sampai 2 hari saja dan di musim hujan kejadian seperti ini bisa terulang 2 sampai 4 kali.

Dengan kondisi wilayah, sarana dan prasarana serta infrastruktur seperti tergambar di atas maka seperti halnya suatu hal yang sangat membebani siswa jika melakukan Gerakan Literasi Sekolah karena ketika sampai di sekolah siswa biasanya mengganti pakaian yang digunakan untuk berangkat dari rumah dengan pakaian dan atribut sekolah lainnya untuk kemudian melepas lelah sejenak.

Program Gerakan Literasi Sekolah juga merupakan hal yang sangat baru dan asing bagi siswa dengan kondisi wilayah seperti perbatasan karena membaca saja terkadang siswa SMP di tingkat/ Kelas VII masih

terbata-bata, hal ini disebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya juga adalah kurangnya minat siswa membaca, dalam kasus ini Gerakan Literasi Sekolah adalah sebuah solusi yang memang dinilai tepat jika diterapkan di sekolah yang siswanya tinggal di asrama atau berada tidak jauh dari lingkungan sekolah karena dengan pembiasaan akan menumbuhkan kecintaan.

Pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang memaksakan hasil haruslah yang terbaik tanpa menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai hasil itu sendiri. Jika kebijakan hanya sebatas kebijakan untuk sekedar memperbaiki tingkat membaca penduduk Indonesia secara keseluruhan apakah artinya kebijakan itu untuk sekolah-sekolah terpencil di perbatasan yang memiliki banyak keterbatasan dan memiliki kesenjangan dengan segala fasilitas yang dimiliki dan dapat dinikmati sekolah-sekolah diperkotaan, hingga pada akhirnya Program Gerakan Literasi Sekolah hanyalah aturan semata dan tekanan yang tidak akan terlaksana jika Pemerintah tidak menyediakan Buku-buku bacaan untuk sekolah-sekolah diperbatasan, membangun perpustakaan yang layak serta menyiapkan akses informasi yang luas bagi masyarakat perbatasan dan infrastruktur jalan yang memadai.

Kepekaan pemerintah hanya terletak pada nilai akhir bukan pada proses diterapkannya sebuah kebijakan sehingga menyebabkan sekolah di perbatasan harus menghasilkan nilai akhir yang setara dengan sekolah diperkotaan.

Apabila Pemerintah ingin Gerakan Literasi sukses secara nasional seharusnya pemerintah mulai mempertimbangkan beberapa program untuk dievaluasi kembali, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dimana bantuan tersebut dapat dialihkan atau disalurkan Buku Bacaan yang berkualitas yang dapat menumbuhkan Rasa Nasionalisme dan Kebhineka Tunggal Ikaan masyarakat dan Bangsa dengan menyilipkan atau mengganti bantuan tersebut dengan 1 (satu) buku bacaan disetiap pencairannya, dengan demikian masyarakat akan sadar bahwa membaca itu penting apabila sudah diberikan fasilitas seperti itu dan memanfaatkan buku dengan baik seperti tujuan yang ingin dicapai melalui Program Gerakan Literasi Nasional atau dengan memberikan bantuan 1 (satu) buku kepada masyarakat / siswa diperbatasan dalam 1 (satu) triwulan, dengan demikian program Gerakan Literasi Nasional dapat berjalan dengan baik

**) Penulis : Guru SMP Negeri 3 Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang*

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI SUPERVISI PEMBELAJARAN DI KELAS DALAM PERSPEKTIF PROFESI PENDIDIKAN

Oleh :
Etty Lestari *

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Menjamin mutu pendidikan dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia. Dalam rangka perbaikan mutu pendidikan, pemerintah telah melakukan perbaikan kurikulum, peningkatan mutu guru, penyediaan sarana dan prasarana, perbaikan kesejahteraan guru, perbaikan organisasi sekolah, perbaikan manajemen, pengawasan dan perundang-undangan.

Demikian juga halnya di Provinsi Kalimantan Barat, usaha untuk peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 telah melaksanakan berbagai kegiatan baik melalui pelatihan guru, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar mampu menghasilkan pendidikan yang bermutu, maka kepala sekolah sebagai manajer dalam lembaga pendidikan harus mampu membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan mengadakan pengawasan terhadap program dan kegiatan pendidikan. Usaha ini agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, dan benar-benar dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga yang memiliki kinerja yang bermutu, bila pelaksanaannya berdasarkan siklus manajemen diawali dengan penyusunan program, pembagian tugas yang teratur, pelaksanaan program, proses pelaksanaan diawasi dan hasilnya dievaluasi. Kemudian, hasil evaluasi dijadikan bahan untuk menyusun program baru, demikian seterusnya, sehingga kegiatan tersebut merupakan siklus yang dinamis, perkembangan menuju hasil yang baik.

Oleh karena itu, kepala sekolah harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan setiap tahunnya dengan memperhatikan komponen dasar yang mempengaruhi yaitu kurikulum dan proses pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan sekolah, ketenagaan, pembiayaan, sarana prasarana, peserta didik, peran serta masyarakat, lingkungan dan budaya sekolah.

B. Uraian Masalah

Pendidikan akan berhasil apabila masyarakat pendidikan mampu memenuhi upaya peningkatan mutunya. Diharapkan sekolah mampu mencapai standar mutu yang dipersyaratkan, maka sekolah tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang kompetitif yang baik yang bertaraf nasional bahkan diharapkan bertaraf internasional. Yang menjadi masalah, apakah sekolah-sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sudah mampu mewujudkan sekolah yang berstandar nasional?

Peningkatan mutu akan dipenuhi, apabila pembinaan sumber daya manusia terus terjaga kualitas profesionalnya. Selain itu, sekolah perlu menerapkan pengawasan yang intensif, hal ini agar semua kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan dapat memenuhi standar dan pencapaiannya terukur. Untuk mewujudkan itu semua pengawasan atau kontrol yang teratur dan intensif dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan supervisi baik yang dilakukan oleh pemerintah, pengawas sekolah, kepala sekolah, teman sejawat guru, dan stakeholder. Dengan demikian, pertanyaannya adalah apakah penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui supervisi pembelajaran di kelas dalam perspektif profesi pendidikan?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah menjadikan sumber daya manusia yang profesional dalam menjalankan tugas kepengawasan dan kepala sekolah menjadikan pemimpin yang berkompeten serta menjadi sekolah yang berkembang.
2. Pengawas, kepala sekolah, dan guru mampu mewujudkan hasil supervisi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

II. Pembahasan

1. Pengertian dan Makna Supervisi Pendidikan

a. Konsep Supervisi Pendidikan

Menurut Burton dan Brueckner dalam Syaiful (2009: 1940) bahwa Supervisi Pendidikan adalah suatu teknik pelayanan yang bertujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lain halnya menurut pendapat Neagley mengemukakan bahwa setiap layanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan instruksional, layanan belajar, dan perkembangan kurikulum. Jadi, berdasarkan kedua pendapat tersebut apabila disimpulkan menjadi suatu program perbaikan, maka melalui Supervisi Pendidikan dengan teknik layanan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja guru-guru akan menghasilkan perbaikan instruksional, layanan belajar, dan perkembangan kurikulum diharapkan akan mampu memperbaiki layanan perkembangan anak atau peserta didiknya.

b. Layanan Di Sekolah

Suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan dengan layanan di sekolah yang baik, akan berhasil jika semua unsur yang terkait di dalamnya dapat bekerja sama atau menjadi tim kerja yang solid untuk mencapai tujuan sekolah. Keberhasilan suatu sekolah akan terlihat dari kualitas pembelajaran yang dipengaruhi oleh kualitas profesional kinerja kepala sekolah dan guru. Oleh karena itu, perlu usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini perlu mendapat perhatian dan bantuan profesional secara terus-menerus dari penanggungjawab pendidikan. Peningkatan kemampuan profesional ini akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh kepala sekolah dan guru itu sendiri dengan kemauan dan usaha sendiri.

Usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional kepala sekolah dan guru dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk penyegaran, konsultasi, bimbingan teknis, dan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh kelompok kerja, misalnya untuk guru, melalui KKG, MGMP, dan untuk kepala sekolah dapat melalui KKKS/MKKS. Selain itu, dapat juga dilakukan oleh sekolah itu sendiri, yaitu guru meningkatkan kualitas mengajarnya agar tetap terjaga kualitas layanan belajar siswa. Kemudian, kepala sekolah melakukan supervisi terhadap guru yang dilakukan melalui perencanaan matang. Hal ini sesuai dengan maksud supervisi pendidikan pada umumnya usaha yang mengacu pada perbaikan situasi belajar dan mengajar. Jadi, kepala sekolah melakukan supervisi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ketika melakukan persiapan/perencanaan, kepala sekolah mensosialisasikan rencana kegiatan supervisi terhadap guru-guru. selanjutnya sesuai dengan permasalahan yang ada pada guru, kepala sekolah membuat instrument yang sesuai. Kegiatan pelaksanaan akan dilakukan dengan kesepakatan bersama guru-guru. Setelah melaksanakan supervisi dimulai dari perangkat pembelajaran, observasi kelas, lalu dilakukan tindak lanjut.

Jadi, pada hakikatnya supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan profesional guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki proses pembelajaran dengan melakukan simulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinyu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Hal ini memberi gambaran bahwa melalui supervisi merupakan bentuk bantuan dan bimbingan atau tuntutan ke arah situasi pendidikan yang lebih baik kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya di bidang pendidikan sebagai upaya bagian dari peningkatan mutu pembelajaran. Dengan demikian, guru-guru yang telah mendapat bimbingan akan





Foto : tabloidnova.com

mampu membantu siswanya dalam memecahkan kesulitan belajarnya agar mampu mencapai pada kurikulum yang berlaku.

c. Pelaksanaan Supervisi

Dalam pelaksanaan supervisi di sekolah, seorang kepala sekolah menggunakan pendekatan-pendekatan supervisi yaitu dengan supervisi membantu, melayani atau membina guru dan personal lainnya di sekolah dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kemampuan mengajar guru. Kepala sekolah sebagai supervisor, memberikan bimbingan secara profesional sebagai usaha memberikan kesempatan bagi guru-guru di sekolahnya untuk berkembang secara profesional. Hal ini dilakukan agar lebih maju lagi dalam memperbaiki dan meningkatkan kemampuan belajar peserta didiknya. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah yang sekaligus menjadi supervisor, hendaknya selalu berusaha meningkatkan kompetensinya agar pengetahuan yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan guru-gurunya. Ini perlu dilakukan agar kepala sekolah memiliki kualitas yang tinggi dalam memberikan bimbingan dan bantuan pada guru sehingga bantuan bimbingan akan lebih berarti.

Dalam pelaksanaan supervisi terhadap guru, kepala sekolah merancang sebagai suatu peningkatan kemampuan guru yaitu meningkatkan proses pembelajaran agar hasil belajar peserta didik meningkat. Interaksi yang dilakukan kepala sekolah dapat dilihat pada (1) perilaku supervisor dalam memberikan layanan kepada guru dengan pembinaan profesional dengan memberikan penguatan pada perilaku mengajar guru; (2) supervisor membantu menumbuhkan profesionalisme guru dengan meningkatkan intensitas pelayanan supervisor terhadap guru; (3) upaya guru membantu peserta didik mencapai harapan belajarnya dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan tuntutan belajarnya. Jadi, kemampuan kepala sekolah sebagai supervisor memberi supervisi kepada guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik menjadi jaminan bahwa kualitas layanan belajar sesuai harapan. Pelaksanaan supervisi terhadap guru-guru interaksi kegiatannya harus menyentuh inti kegiatan belajar mengajar (pembelajaran).

Interaksi tersebut adalah interaksi yang dilakukan mengarah pada perbaikan dan peningkatan situasi belajar mengajar. Jadi, supervise yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun pengawas sekolah haruslah menggambarkan hubungan supervise dengan kualitas pengajaran. Fungsi supervise dan fungsi mengajar menjadi bagian penting dari proses pengajaran. Oleh karena itu, pengajaran selalu terkait dengan semua kegiatan pendidikan di sekolah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan supervisi adalah untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar (pembelajaran).

2. Prinsip-prinsip Supervisi

Pelaksanaan supervisi baik yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh pihak lain, harapannya adalah merupakan kegiatan super-

visi yang menaruh perhatian utama para guru sehingga terjadi perubahan perilaku akademik pada peserta didiknya pada akhirnya akan terjadi peningkatan mutu hasil belajarnya. Dalam melaksanakan supervisi sebagai seorang supervisor, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip supervisi.

Prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan antara lain : (1) ilmiah, yaitu kegiatan supervisi yang dikembangkan/dilaksanakan harus benar-benar sistematis, objektif, dan menggunakan instrument atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercayakan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi pembelajaran; (2) kooperatif, yaitu program supervisi pendidikan dikembangkan atas dasar kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi (supervisor harus bekerjasama dengan guru-guru peserta didik, dan seluruh warga sekolah yang berkepentingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran). (3) konstruktif dan kreatif, yaitu supervisor membina agar mampu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi pembelajaran. Dalam hal ini, guru-guru tidak menunggu ajakan, himbauan, ataupun perintah dari supervisor untuk mengembangkan situasi pembelajaran.

Jadi, supervisor dalam prinsip ini diharapkan mampu menggerakkan guru-guru mengembangkan diri dan profesinya, menggerakkan guru-guru untuk berinisiatif mengambil prakarsa-prakarsa dan giat memperbaiki program pembelajaran dan pendidikan secara konstruktif, menggairahkan peserta didik mengembangkan kreatifitasnya, mengembangkan kepercayaan diri yang tinggi pada diri peserta didik dan mengurangi timbulnya rasa takut, memberikan semangat pada peserta didik untuk mengembangkan komunikasi ilmiah yang bebas terarah, memperkenalkan peserta didik menentukan sendiri sasaran dan evaluasi terhadap dirinya sendiri, dan menghindari pengawasan yang terlalu ketat dan otoriter. (4) realistic, yaitu pelaksanaan supervise harus mampu memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam suatu situasi atau kondisi secara objektif. (5) progresif, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari ukuran dan perhatian langkah yang harus ditempuh. (6) inovatif, yaitu program supervisi. Jadi, sebagai supervisor seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip tersebut, dengan cara memahami dan menguasai secara seksama tugas dan tanggungjawab guru sebagai tenaga kependidikan yang profesional yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Oleh karena itu, supervisor tidak bekerja semauanya sendiri, apalagi sampai menakuti para guru-guru, karena hal ini akan mematikan kreativitas guru. Sikap supervisor tidak mencari-cari kesalahan namun, memberikan semangat agar mau dan mampu menumbuhkan serta mengembangkan kreativitasnya untuk perbaikan pembelajaran.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan supervisi dengan tujuan

untuk memperbaiki kinerja terutama dalam memperbaiki proses pembelajaran. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor, adalah melaksanakan supervisi terhadap guru untuk memelihara atau mengubah pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar lebih baik lagi, sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didiknya. Dalam pelaksanaannya supervisi harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan dengan system yang kontinyu, teratur, dengan harapan guru mampu memperbaiki diri, bahkan dapat dengan sendirinya untuk mengubah kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Harapannya melalui supervisi oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah, mampu meningkatkan pembelajaran yang berkualitas, karena proses pembelajaran yang berkualitas memerlukan guru yang profesional. Guru sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dapat ditingkatkan profesionalnya, baik kemampuan merancang pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran.

3. Teknik-teknik Supervisi Akademik

Untuk mencapai keberhasilan guru mengajar. Seorang supervisor dapat melakukan supervisi yaitu dengan supervise akademik. Supervise ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Hal ini dapat dilakukan agar ketercapaian proses perubahan pada guru cepat dapat diperoleh. Teknik tersebut anatar lain: (1) wawancara; (2) observasi (melalui kunjungan kelas); (3) dokumentasi (silabus, RPP, hasil kerja peserta didik, catatan guru/hasil penilaian guru); (4) menilai diri sendiri; (5) kunjungan antar kelas.

Secara umum, keterkaitan antara teknik dan tujuan supervisi akademik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

4. Umpan Balik Supervisi

Setelah pelaksanaan supervisi, seorang supervisor akan melakukan kegiatan umpan balik. Umpan balik pada hakikatnya merupakan komentar terhadap suatu hasil pekerjaan yaitu proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan yang langsung kepada guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan yang berkebutuhan khusus. Umpan balik diberikan oleh supervisor apa yang terjadi agar guru dapat memahami temuan, mengubah perilaku yang teridentifikasi dan mempraktikkan panduan yang diberikan. Hal-hal yang disampaikan dalam umpan balik, misalnya: perilaku positif pembelajaran yang harus dipelihara, strategi-strategi al-

setelah melakukan supervise terhadap guru. Hal ini karena umpan balik adalah merupakan upaya untuk memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Berdasarkan umpan balik ini, dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, namun, menonjolkan otoritas yang dimiliki guru-guru, dan memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan, serta kinerjanya.

III. Penutup

A. Simpulan

Penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan supervisi terhadap guru-guru di kelas pada satuan pendidikan (sekolah). Hal ini dengan tujuan agar guru-guru mampu memperbaiki kinerjanya setelah mendapat informasi dari umpan balik kegiatan hasil supervisi. Dalam melaksanakan supervisi seorang supervisor dapat melakukannya dengan berbagai teknik dan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi dilakukan dengan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jadi, kegiatan penjaminan mutu pendidikan melalui supervisi merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Kepala Sekolah harus melakukan beberapa pergeseran paradigma dalam pembelajaran yaitu melalui perubahan-perubahan dalam kerangka berfikir para guru yang lebih profesional, sehingga peserta didik mendapat perhatian pemahaman atau pengertian bahwa mereka sesungguhnya memiliki potensi dan kemampuan untuk belajar dan berhasil jika dikelola secara profesional pula oleh guru-guru yang profesional, kepala sekolah yang profesional, dan pengawas profesional. Tentu dibarengi oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah. Oleh karena itu, perlu terobosan-terobosan yang profesional yang lebih inovatif agar dapat melakukan pendekatan pembelajaran yang lebih bermutu dan menarik bagi peserta didik, sehingga peserta didik mengetahui tentang keterampilan bagaimana belajar dalam mencatat, menghafal, membaca dengan cepat, memahami, memaknai, menulis, berhitung dan berfikir kreatif serta belajar menjadi menyenangkan. Apabila semua pendidik memiliki sudut pandang yang baik tentang pentingnya supervisi kelas akan berimbas pada peningkatan kompetensi guru tentulah peningkatan mutu pendidikan juga akan terwujud seperti yang selama ini diharapkan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Jadi, harapannya adalah melalui supervisi kelas mampu meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan pembelajaran bermutu akan menghasilkan hasil belajar yang bermutu pula.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, disarankan agar:

1. Pengawas merancang program kepengawasannya secara teratur melalui kegiatan supervisi, dan melaksanakannya di sekolah binaannya, serta hasilnya dievaluasi dan dibuat laporan.
2. Kepala sekolah melaksanakan supervisi dan pembinaan kepada semua guru agar secepatnya dapat membuat tindak lanjut untuk peningkatan mutu pembelajaran, dan hasilnya dapat dibuat laporan kinerja kepala sekolah.
3. Guru merancang hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan mutu pembelajarannya.

Daftar Bacaan

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Supervisi Akademik*. <http://www.google.com>. diunduh pada tgl 13 September 2015.
- Arikunto, Suharsimi, 2004. *Dasar-dasar Supervisi*. Jakarta: PT Rineka
- Depdikbud, 2014. *Supervisi Akademik*. Bahan Pembelajaran Utama. Pusat pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan & Kebudayaan dan penjaminan Mutu Pendidikan.
- Suriasumantri, Jujun S. (ed) (1981). *Ilmu dalam Prespektif*. Jakarta: Gramedia.
- Syaiful, Sagala, 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.

*J) Penulis adalah Widyaiswara LPMP Kalbar

ternatif untuk mencapai perubahan yang diinginkan, kelayakan/kepatutan dari menggunakan kembali metode yang pernah dilakukan.

Secara umum ada dua metode umpan balik yang efektif yaitu: (1) verbal (lisan), pemberian komentar terhadap hasil pengamatan proses pembelajaran secara langsung melalui tatap muka tidak ada jarak atau peralatan yang digunakan. (2) non-verbal (tertulis) pemberian komentar terhadap hasil pengamatan proses pembelajaran dengan perantara tulisan tanpa adanya pembicaraan secara langsung dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima. Jadi, kegiatan umpan balik memang perlu dilakukan oleh seorang supervisor

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH GURU AGAR MUTU PENDIDIKAN MENINGKAT ?

Oleh : Kasim *)

LATAR BELAKANG

Dalam undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab I pasal 1 no 1 dikatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. No 4 dikatakan bahwa Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan pada BAB III prinsip profesionalitas Pasal 7 (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

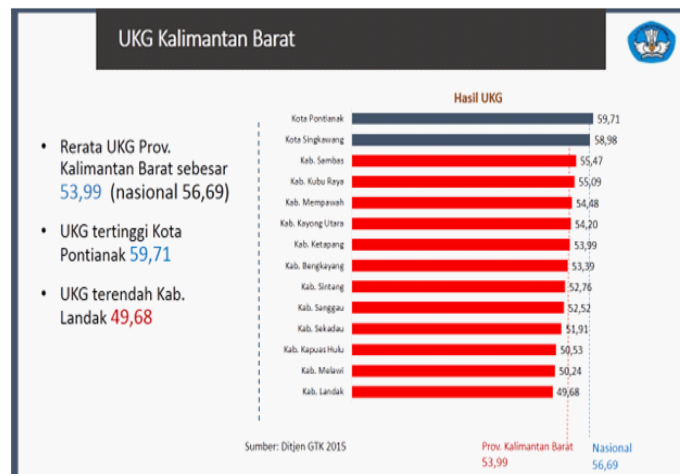
Permen PAN RB no 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya BAB III kewajiban, tanggungjawab, dan wewenang Pasal 6 ; Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah :

- a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7 : Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 8 : Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/ evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru.

Sedangkan berdasarkan hasil UKG tahun 2015 untuk Kalimantan Barat masih tergolong rendah atau masih di bawah rata-rata Nasional seperti terlihat pada tabel berikut ini :



PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut di atas yang menjadi permasalahan adalah “Apa yang harus dilakukan oleh guru agar mutu pendidikan meningkat ?”

PEMBAHASAN

Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum atau sebagai acuan memfasilitasi guru agar menjadi guru yang profesional. Dimulai dari Undang Undang no 20 th 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Undang Undang no 14 th 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan menteri pendidikan nasional no 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi dan kualifikasi guru, peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, permendiknas no 39 tahun 2009 tentang beban kerja guru, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara & regulasi birokrasi no 16 th 2009 tentang guru dan angka kreditnya, peraturan bersama menteri pendidikan nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor : 03/v/pb/2010 nomor : 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua kebijakan tersebut sebagai dasar untuk meningkatkan profesionalisme guru yang sasaran akhirnya adalah meningkatnya mutu pendidikan yang dihasilkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Idialnya jika guru profesional, proses pembelajarannya sesuai dengan tuntutan maka proses berfikir siswa hasil belajarnya akan meningkat. Berikut ini adalah contoh proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran.



SDN 05 sapan jagoi babang

SDN Tlogo waru Malang

A. Merubah mindset

Penolakan terhadap suatu kebijakan atau sikap pesimisme terhadap pekerjaan ada kalanya bukan karena tidak mempunya seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi lebih kepada cara pandang atau pola pikir yang merasa sudah berada pada “zona nyaman” sehingga tidak mau berubah. Tidak mau menyulitkan diri dengan belajar, berfikir kritis dan inovatif, dan ini dianggap sebagai beban. Pola pikir menjadi sangat penting dan menjadi motivasi bagi kita untuk berubah serta dapat menerima perubahan.

Mindset atau pola pikir adalah asumsi, cara, atau notasi seseorang atau kelompok orang dalam menghargai atau menerima sesuatu hal sehingga dengan rela mengadopsinya atau menerimanya sebagai sesuatu pilihan. Fenomena ini kadang-kadang disebut juga sebagai proses mental, pola pikir umum atau paradigma sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan (Wikipedia). Inti dari fenomena ini ialah dapat menerima sesuatu sebagai sebuah pilihan. Dinyatakan Carol Dweck (2012) sebagaimana dikutip Wikipedia menyatakan bahwa pola pikir merupakan sumber kekuatan kemampuan seseorang. Mengenai kekuatan dibedakan dalam dua pandangan. Pertama menyatakan bahwa pola pikir itu tetap “*fixed mindset*” atau karakteristiknya dibawa sejak lahir. Pandangan kedua pola pikir dipandang sebagai sesuatu yang tumbuh – “*growth mindset*”. Kecerdasannya tumbuh karena pada dirinya berkembang pola pikir yang tumbuh – “*growth mindset*”. Pertumbuhannya karena kerja keras, belajar, pelatihan serta ketabahan-nya (<http://gurupembaharu.com>)

Persoalannya selanjutnya adalah bagaimana agar kita dapat mengubah sikap. Dalam konsep taksonomi bloom, pengembangan sikap digambarkan sebagai berikut :

1. Berterima (*Receiving*); yang ditunjukkan dengan tumbuhnya kesadaran seperti yang tampak pada kesediaan untuk mendengar atau memperhatikan secara selektif
2. Merespon (*Responding*); yang ditunjukkan dengan aktif berpartisipasi sebagai bagian dari komunitas belajar. Merespon dapat dinyatakan dalam aktivitas bertanya, bertindak, menyetujui cara atau praktik, atau menyatakan menolak.
3. Menghargai (*Valuing*); nilai seseorang yang melekat pada objek tertentu, fenomena, atau perilaku. Hal tersebut melekat pada sikap keberterimaan yang sederhana hingga bentuk keberterimaan yang kompleks seperti dalam bentuk komitmen. Sikap menghargai berbasis internalisasi serangkaian nilai yang ditentukan. Nilai-nilai itu tercermin dalam perilaku yang teramati. Sikap menghargai dapat dilihat dalam proses demokratis, sikap sensitif terhadap kepentingan umum, kemampuan memecahkan masalah dengan mengembangkan rencana perbaikan sosial melalui pembentukan komitmen untuk membela kebaikan bersama
4. Mengorganisasikan (*Organization*) yaitu menerapkan nilai-nilai ke dalam prioritas yang berbeda, menghindari atau menyelesaikan konflik, dan menciptakan sistem nilai yang unik. Penekanan sikap pada level ini yaitu menunjukkan kemampuan membandingkan, menghubungkan, atau menganalisis nilai. Dalam operasionalnya Seorang guru mampu membedakan yang baik dan yang buruk; bersikap dalam memanfaatkan kebebasan, tetapi mengedepankan tanggung jawab, mampu mengembangkan sikap harmoni dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan.
5. Menginternalisasi nilai (Berkarakter) merupakan level sikap tertinggi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilakunya. Perilaku yang menunjuk-

kan kepatuhan kepada Tuhan, jujur, bertanggung jawab, amanah, konsisten, dan karakteristik utama yang diyakini sangat penting perlu dimiliki seorang guru. Secara umum internalisasi ini mengandung kemampuan bersikap menghargai pribadi, kepekaan sosial, dan stabilitas emosional. Pada level ini guru hendaknya menguasai empat sifat utama yaitu berbicara dengan benar, relevan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan; dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab; bersikap terbuka dalam menyampaikan kebenaran, objektif, tidak mengada-ada; dan berbicara berdasarkan data yang benar serta cerdas dalam menyampaikannya. Dalam konteks sosial pada level ini kemampuan guru ditempa agar memiliki ketangguhan menempatkan diri di tengah lingkungannya dengan cerdas.

B. Evaluasi diri

Yang dimaksudkan evaluasi diri dalam tulisan ini adalah, seorang guru wajib mempelajari kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru dalam permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Secara individu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang masih belum dikuasai dengan menuliskan pernyataan secara spesifik sertamengidentifikasi kelemahan dan kekuatan diri dalam penguasaan kompetensi guru. Setelah mengetahui tentang kelemahan serta kekuatan yang dimiliki selanjutnya seorang guru berusaha melakukan peningkatan kompetensinya dengan merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan.

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik (10 komponen) , kepribadian (5 komponen), sosial (4 komponen) , dan profesional (5 komponen). Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

Masih ada teman-teman guru yang tidak dapat menyebutkan

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
Kompetensi Pedagogik		
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1 Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. 1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.

ada berapa standar kompetensi guru dan apa saja komponennya. Sehingga pada saat mengikuti Uji Kompetensi Guru atau mengikuti PLPG yang kisi-kisinya mengacu pada standar tersebut baru terperangah dan merasa tidak mampu untuk menjawab soal-soal tersebut. Andaikan guru sempat membaca dan mempelajari dari komponen standar tersebut serta menerapkannya dalam kesehariannya tentulah tidak akan mengalami kesulitan. Berikut ini misalkan kita ambil salah satu komponen. Untuk Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI, kompetensi pedagogik terdiri dari 10 kompetensi inti guru, masing-masing butir kompetensi inti dijabarkan dalam kompetensi guru kelas SD/MI seperti berikut ini :

Jika diterapkan dalam pembelajaran dan akan di nilai kinerjanya berikut ini adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan.

Kompetensi 1 : Mengenal karakteristik peserta didik

- Jenis dan cara menilai : Kompetensi Pedagogik (Pengamatan dan Pemantauan)
- Pernyataan : Guru mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik intelektual, sosial emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya.

Indikator

1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya.
2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda.
4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.
5. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik.



6. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga



gapeserta didiktersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, di-
olok-olok,minder, dsb).

C. Belajar sepanjang hayat

Jangan pernah berkata bahwa ini jamannya anak sekarang, karena kita juga ada di jaman ini. Artinya kita juga harus mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan pada



saat ini. Bahkan kita sebagai seorang guru yang menyiapkan generasi pemimpin di masa yang akan datang, maka konsekuensinya kita harus menyiapkan anak didik yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dengan kata lain kita juga harus terus belajar. Maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan adanya program guru pembelajar dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru.

Banyak cara atau wadah yang dapat diikuti oleh guru dalam mengembangkan kompetensinya misalkan seperti berikut ini :

Selain hal tersebut yang juga harus dilakukan dalam meningkatkan mutu sekolah adalah dengan melakukan sitem penjaminan mutu di sekolah, karena ujung tombak sitem penjaminan mutu itu berada pada satuan pendidikan. Dan untuk kegiatan ini kepala sekolah sebagai manajer memegang peranan dan kendali mutu yang amat sangat menentukan. Berikut ini aadalah contoh bagan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan.

KESIMPULAN

yang harus dilakukan oleh guru agar mutu pendidikan meningkat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Merubah mindset
2. Evaluasi diri
3. Belajar sepanjang hayat

Referensi

- Bahan pelatihan penilaian kinerja guru. 2012. Lembar pernyataan kompetensi, indikator, dancara menilai PK Guru Kelas / MataPelajaran. Jakarta
- Materi diklat Calon Kepala sekolah tentang perubahan mind set (2009) solo
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional no 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi dan kualifikasi guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan,
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru
- Peraturan mentri pendidikan nasional no 39 tahun 2009 tentang beban kerja guru,
- Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur negara & Regulasi Birokrasi no 16 tahun 2009 tentang guru dan angka kreditnya
- peraturan bersamamenteri pendidikan nasionaldankepala badan kepegawaian negaranomor : 03/v/pb/2010nomor : 14 tahun 2010tentangpetunjuk pelaksanaan jabatan fungsionalguru dan angka kreditnya
- Undang Undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Undang Undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- *) Penulis adalah Widyaiswara LPMP Kalimantan Barat*

GALERI FOTO



LPMP Kalimantan Barat menduduki peringkat I Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Peringkat III Tata Kelola Keuangan DIPA TA 2016 oleh Kementerian Keuangan Kanwil Provinsi Kalimantan Barat



Kegiatan Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor Guru Pembelajaran
Jenjang Sekolah Dasar Region Kalimantan Barat



Kunjungan LPMP Kalimantan Barat ke beberapa sekolah dan institut di Sarawak, Kuching, Malaysia
Salah satu diantaranya Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak Malaysia



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Abdul Muis Tanjung Hulu
Pontianak Timur Kalimantan Barat 78327
Telp. (0561) 742110 - Fax (0561) 746618
Laman : <http://www.lpmp-kalbar.net>
E-mail : mailbox@lpmp-kalbar.net